

20 20



LAPORAN KINERJA KKP KELAS I MAKASSAR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara yang berisi capaian program dan kegiatan KKP Kelas I Makassar.

Laporan ini memberikan gambaran secara umum capaian kinerja KKP Kelas I Makassar yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada tahun berikutnya.

Makassar, Januari 2021

Pt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Makassar,



dr. Mun. Haskar Hasan, M.Kes
NIP. 196610142001121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala KKP Kelas I Makassar selaku Pihak Pertama dan Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kinerja tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tahun 2020 berbeda dengan indikator tahun 2019 yang berjumlah 12 (dua belas).

Adapun 7 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dengan target 3.722.715;
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan target 90%;
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan target 85%;
4. Nilai kinerja anggaran dengan target 80;
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dengan target 80%;
6. Kinerja implementasi WBK satker dengan target nilai 70;
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target 45%.

Ketujuh indikator dengan capaian rata-rata sebesar 113,32%, dengan rincian indikator 1 sebesar 108,27%, indikator 2 sebesar 111,11%, indikator 3 sebesar 114,81%, indikator 4 sebesar 105,88%, indikator 5 sebesar 123,21%, indikator 6 sebesar 116,37, serta indikator 7 sebesar 113,62%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan KKP Kelas I Makassar tahun 2020 bersumber dari pagu sebesar Rp. 27.997.490.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.540.114.971,- atau sebesar 94,79%.

Dalam laporan kinerja ini KKP Kelas I Medan dijadikan sebagai pembanding capaian kinerja untuk ke 7 indikator kinerja, hal ini karena KKP Kelas I Medan dan KKP Kelas I Makassar memiliki karakteristik yang hampir sama, meliputi :

1. Klasifikasi kelas yang sama yaitu kelas I;
2. Lingkup kawasan yang memiliki Pelabuhan Laut dan Bandar Udara;
3. Melayani embarkasi/debarkasi haji.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhitar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik.....	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Visi dan Misi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Sumber Daya	13
G. Permasalahan Utama Organisasi.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	23
A. Perencanaan Kinerja.....	23
1. Rencana Aksi Kegiatan	23
2. Rencana Kinerja Tahunan	24
B. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	107
BAB IV Penutup	118
Pustaka Acuan	119
Penyusun	120
Lampiran	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	7
Gambar III.1	<i>Screenshot</i> Capaian Nilai SMART DJA KKP Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2020	84
Gambar III.2	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Juni Tahun Anggaran 2020	91
Gambar III.3	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Juli Tahun Anggaran 2020	91
Gambar III.4	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020	92
Gambar III.5	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan September Tahun Anggaran 2020	92
Gambar III.6	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020	93
Gambar III.7	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan November Tahun Anggaran 2020	93
Gambar III.8	<i>Screenshot</i> Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Desember Tahun Anggaran 2020	94

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jabatan Struktural KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	14
Tabel I.2	Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	14
Tabel I.3	Jabatan Fungsional Umum KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	15
Tabel I.4	Realisai Anggaran Belanja DIPA/RKAKL Pada KKP Kelas I Makaassar	16
Tabel I.5	Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	17
Tabel I.6	Kendaraan Bermotor dan Alat Bermotor Lainnya KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	18
Tabel I.7	Peralatan Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	19
Tabel II.1	Indikator Kinerja RAK KKP Kelas I Makassar tahun 2018 dan 2019	23
Tabel II.2	Indikator Kinerja RKT KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	25
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	26
Tabel II.4	Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	26
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 dan Indikator serta Target RAP Ditjen P2P Tahun 2020	28
Tabel III.2	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan Sesuai Standar Kekearifan Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	30
Tabel III.3	Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Wilayah Layanan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	35
Tabel III.4	Perbandingan RAP dengan RAK Indikator kedua KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	37
Tabel III.5	Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	41
Tabel III.6	Rekomendasi Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	43

Tabel III.7	Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon Kurang Dari 24 Jam	61
Tabel III.8	Penyusunan Renkon di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar .	61
Tabel III.9	Penyusunan Renkon di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	62
Tabel III.10	Nilai Indeks Pinjal di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	63
Tabel III.11	House Indeks di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	65
Tabel III.12	Faktor Risiko yang Telah Dikendalikan (HI>0) di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	67
Tabel III.13	Keberadaan Larva Anopheles sp di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	67
Tabel III.14	Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	69
Tabel III.15	Faktor Risiko yang telah Dikendalikan (Kepadatan Kecoa ≥ 2) Di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	70
Tabel III.16	Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	71
Tabel III.17	Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 setelah Dilakukan Tindakan Pengendalain	73
Tabel III.18	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi TTU di Wilayah Kerja Kelas I Makassar Tahun 2020	73
Tabel III.19	Distribus Hasil Pemeriksaan Sanitasi TPM di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	74
Tabel III.20	Distribusi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	76
Tabel III.21	Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	90
Tabel III.22	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Implementasi WBK KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	94
Tabel III.23	Perbandingan Target dan Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	100

Tabel III.24	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	104
Tabel III.25	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	104
Tabel III.26	Realisasi Anggaran berdasarkan Output dan Sub Output Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	104
Tabel III.27	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Pertama Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	106
Tabel III.28	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kedua Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	108
Tabel III.29	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketiga Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	109
Tabel III.30	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keempat Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	110
Tabel III.31	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kelima Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	110
Tabel III.32	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keenam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	111
Tabel III.33	Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketujuh Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik	III.1	Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan tahun 2020	31
Grafik	III.2	Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	31
Grafik	III.3	Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	37
Grafik	III.4	Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	38
Grafik	III.5	Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	77
Grafik	III.6	Perbandingan Capaian Indikator Ke-3 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	77
Grafik	III.7	Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	85
Grafik	III.8	Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan.....	85
Grafik	III.9	Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	94
Grafik	III.10	Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	95
Grafik	III.11	Perbandingan Capaian Indikator Ke-6 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	100
Grafik	III.12	Perbandingan Capaian Indikator Ke-6 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	100
Grafik	III.13	Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020	105
Grafik	III.14	Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen P2P mempunyai beberapa Unit Pelaksana Teknis. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Pelaksanaan tugas pokok KKP Kelas I Makassar selama 1 (satu) tahun dituangkan dalam Laporan Kinerja (Lapkin) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan rencana kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Lapkin tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis dari Perpres tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk teknis pelaksanaan kegiatan KKP Kelas I Makassar tahun 2020 sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2020-2024 Revisi Desember 2020. Dalam RAK revisi tahun 2020 terdapat revisi Pagu Anggaran, perubahan target indikator, serta perubahan Pejabat Pejabat Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon. Untuk pagu anggaran berubah menjadi Rp. 27.997.490.000,-, hal ini akibat penurunan pagu PNBK. Target Indikator juga mengalami perubahan yaitu pada indikator 1 menjadi 3.722.715. Penandatangan Perjanjian Kinerja Desember Tahun 2020 juga

mengalami perubahan untuk Pihak Pertama menjadi Plt. Kepala KKP Pelabuhan Kelas I Makassar dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 terdapat 2 (dua) kegiatan untuk KKP Kelas I Makassar yaitu :

1. Dukungan pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk negara dan wilayah;
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut didasari dengan 7 indikator yaitu :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaaan kesehatan
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Capaian indikator tersebut akan dibahas dan dianalisa dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja (Lapkin) KKP Kelas I Makassar tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja berisi gambaran kegiatan tahun 2020 yang memuat target serta capaian kinerja atas indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KKP Kelas I Makassar dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Penyusunan laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memuat pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Adapun tujuan dari KKP Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;
- b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB penyakit menular dan penyakit menular potensial wabah;
- c. Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;
- d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;
- e. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas darat negara;

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan mata termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

D. VISI DAN MISI

Tidak terdapat visi dan misi yang tercantum dalam RAP Ditjen P2P sehingga mengikuti visi misi Pemerintah (2020-2024) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Visi Pemerintah yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui sembilan misi Pemerintah yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi Kementerian Kesehatan yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memperkuat upaya Kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia;
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarasutamakan pembangunan kesehatan;
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan;
4. Memantapkan tata Kelola pemerintah yang baik, bersih dan inovatif.

E. STRUKTUR ORGANISASI

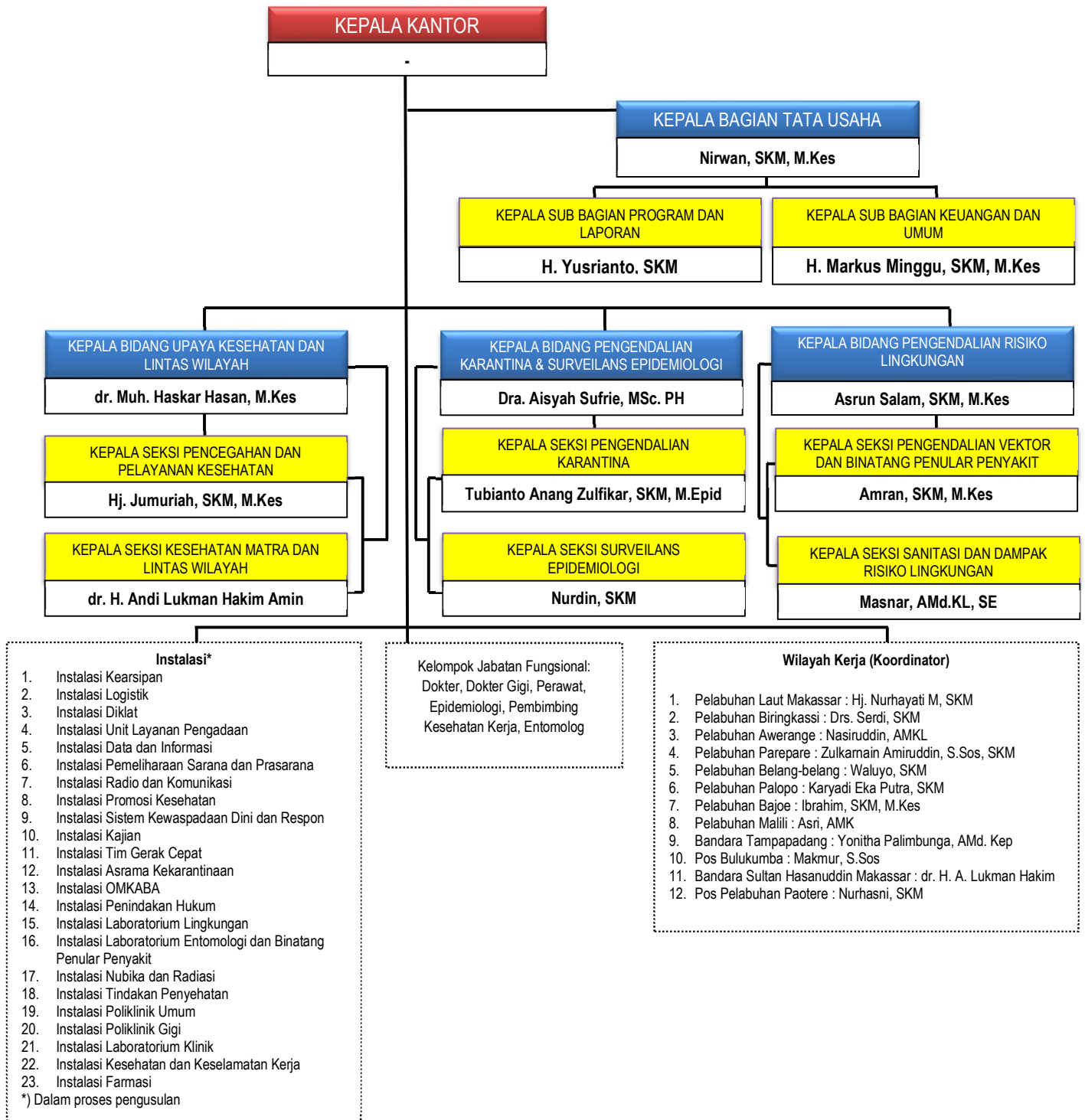
Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22

November 2011; tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari dua sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari dua seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengendalian Karantina
 - b. Seksi Surveilans Epidemiologi
3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri dari dua seksi Yaitu :
 - b. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
 - c. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan
4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdiri dari dua seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
5. Wilayah Kerja
6. Instalasi
7. Kelompok jabatan fungsional

Jabatan Kepala KKP Kelas I Makassar dijabat oleh Plt. dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes sejak 20 November 2020 sampai sekarang sesuai Surat Perintah Menteri Kesehatan Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) RI Nomor : KP.03.04/MENKES/1747/2020.

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar I.1 berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Uraian tugas masing-masing bagian dan bidang adalah :

1. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Program dan Laporan
 - 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program
 - 2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
 - 3) Menyebarluaskan informasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum
 - 1) Melaksanakan Urusan Akuntansi, Verifikasi serta Mobilisasi Dana
 - 2) Melaksanakan Urusan Tata Usaha
 - 3) Melaksanakan Urusan Kepegawaian
 - 4) Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - 5) Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan

2. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
 - a. Seksi Pengendalian Karantina
 - 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor
 - 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengawasan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 4) Penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara dan alat transportasi lainnya.
 - 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengangkutan orang sakit/jenazah.
 - 6) Kajian di bidang kekarantinaan
 - 7) Pengembangan teknologi di bidang kekarantinaan
 - 8) Pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan

b. Seksi Surveilans Epidemiologi

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional.
- 5) Kesiapsiagaan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 6) Pengkajian KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 7) Advokasi KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan
- 8) Penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang kesehatan

3. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit

- 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit.
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan tikus dan pinjal.
- 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan pestisida.
- 4) Kajian dan diseminasi informasi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

- 5) Pengembangan jejaring kerja bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 6) Pengembangan kemitraan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 7) Pengembangan teknologi bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.
- 8) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit.

b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

- 1) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- 2) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan makanan dan minuman.
- 3) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat.
- 4) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/bangunan.
- 5) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pencemaran udara, air dan tanah.
- 6) Penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih.
- 7) Kajian dan diseminasi informasi bidang sanitasi lingkungan
- 8) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang sanitasi lingkungan
- 9) Pengembangan teknologi bidang sanitasi lingkungan
- 10) Pendidikan dan pelatihan bidang sanitasi lingkungan

4. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
 - a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
 - 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan.
 - 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pengawasan obat/P3K di kapal/pesawat/alat transportasi lainnya.
 - 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kajian ergonomik.
 - 4) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja
 - 5) Pengembangan jejaring kerja di bidang kesehatan kerja
 - 6) Pengembangan kemitraan bidang kesehatan kerja
 - 7) Pengembangan teknologi bidang kesehatan kerja
 - 8) Pelatihan teknis bidang kesehatan kerja
 - b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
 - 1) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV)
 - 2) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah
 - 3) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan matra
 - 4) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kesehatan haji
 - 5) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan perpindahan penduduk
 - 6) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana

- 7) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas
- 8) Menyiapkan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan rujukan gawat darurat medik.
- 9) Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan matra
- 10) Pengembangan teknologi bidang kesehatan matra
- 11) Pelatihan teknis bidang kesehatan matra.

5. Instalasi

Instalasi dimaksudkan guna mendukung program yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar. Menindaklanjuti hasil kesepakatan pertemuan pengisian aplikasi ABK *Online* UPT di lingkungan Ditjen P2P tanggal 27 dan 28 November 2017 dimana salah satu kesepakatannya adalah untuk mengirimkan usulan instalasi, maka KKP Kelas I Makassar mengusulkan instalasi sesuai dengan Surat Kepala KKP Kelas I Makassar Nomor OT.03.02/1.2/4778/2017 tanggal 4 Desember 2017 sebagai berikut:

- a. Instalasi Kearsipan
- b. Instalasi Logistik
- c. Instalasi Diklat
- d. Instalasi Unit Layanan Pengadaan
- e. Instalasi Data dan Informasi
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- g. Instalasi Radio dan Komunikasi
- h. Instalasi Promosi Kesehatan
- i. Instalasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
- j. Instalasi Kajian
- k. Instalasi Tim Gerak Cepat
- l. Instalasi Asrama Kekeparantinaan
- m. Instalasi OMKABA
- n. Instalasi Penindakan Hukum
- o. Instalasi Laboratorium Lingkungan

- p. Instalasi Laboratorium Entomologi dan Binatang Penular Penyakit
 - q. Instalasi Nubika dan Radiasi
 - r. Instalasi Tindakan Penyehatan
 - s. Instalasi Poliklinik Umum
 - t. Instalasi Poliklinik Gigi
 - u. Instalasi Laboratorium Klinik
 - v. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - w. Instalasi Farmasi
- Saat ini instalasi yang diusul di atas belum mendapatkan persetujuan tertulis dari Dirjen P2P Kemenkes RI.

F. SUMBER DAYA

Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang ASN dan ditambah tenaga Non ASN berdasarkan data RKAKL 2020 yakni satpam sebanyak 9 orang, sopir sebanyak 12 orang, cleaning service sebanyak 9 orang, epidemiolog sebanyak 2 orang, sanitarian 2 orang dan pengadministrasi umum sebanyak 1 orang.

a. Menurut Jabatan:

1) ASN	=	133 orang
a) Jabatan Struktural	=	12 orang
b) Jabatan Fungsional Teknis	=	41 orang
c) Jabatan Pelaksana	=	80 orang
2) Non ASN	=	35 orang
a) Pengamanan Kantor (Satpam)	=	9 orang
b) Pengemudi (Sopir)	=	12 orang
c) Cleaning Service	=	9 orang
d) Sanitarian	=	2 orang

e) Epidemiolog = 2 orang

f) Pengadministrasi Umum = 1 orang

Tabel I.1, I.2, dan I.3 menunjukkan pengelompokan ASN berdasarkan jabatan.

Tabel I.1 Jabatan Struktural KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Kepala KKP Kelas I Makassar	-
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan & Umum	1
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan	1
5.	Kepala Bidang Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi	1
6.	Kepala Seksi Pengendalian Karantina	1
7.	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi	1
8.	Kepala Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan	-
9.	Kepala Seksi Pengendalian Vektor & Binatang Penular Penyakit	1
10.	Kepala Seksi Sanitasi & Dampak Risiko Lingkungan	1
11.	Kepala Bidang Upaya Kesehatan & Lintas Wilayah	1
12.	Kepala Seksi Pencegahan & Pelayanan Kesehatan	1
13.	Kepala Seksi Kesehatan Matra & Lintas Wilayah	1
Jumlah		12

Tabel I.2 Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No.	Fungsional Tertentu	Jumlah (Orang)
1	Dokter Ahli Madya (JFT)	2
2	Dokter Gigi Ahli Madya (JFT)	1
3	Dokter Ahli Muda (JFT)	4
4	Dokter Ahli Pertama (JFT)	1
5	Perawat Ahli Madya (JFT)	1
6	Perawat Penyelia (JFT)	2
7	Perawat Ahli Muda (JFT)	1
8	Perawat Ahli Pertama (JFT)	5
9	Perawat Mahir (JFT)	2
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	2
11	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	4
12	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	8
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
14	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	1
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	1
17	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
18	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	3
Jumlah		42

Tabel I.3 Jabatan Fungsional Umum KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No.	Fungsional Umum	Jumlah (Orang)
1	Dokter	10
2	Perawat Ahli	2
3	Perawat / Pengelola Keperawatan	17
4	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
5	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi	14
6	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan	4
7	Sanitarian Pemula	1
8	Epidemiolog Kesehatan Ahli	2
9	Epidemiolog	2
10	Entomolog Kesehatan Ahli	1
11	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	4
12	Bendahara	2
13	Analisis Keuangan	2
14	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan	2
15	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4
16	Analisis Kepegawaian Ahli / Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	3
17	Pengelola Barang Milik Negara	4
18	Pengelola Data	2
Jumlah		79

b. Menurut Golongan:

- 1) Golongan II = 19 orang
- 2) Golongan III = 93 orang
- 3) Golongan IV = 21 orang

c. Menurut Pendidikan:

- 1) S2 = 44 orang
- 2) S1 = 47 orang
- 3) DIV = 5 orang
- 4) DIII = 33 orang
- 5) SMA = 4 orang

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukkan kekuatan SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Dengan proporsi SDM

yang ada, masih perlu peningkatan kualitas terutama dalam pemahaman dan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Untuk itu selain melalui peningkatan jenjang pendidikan formal, peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan diskusi-diskusi teknis baik melalui pertemuan secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang sangat cepat saat ini.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Anggaran KKP Kelas I Makassar tahun 2020 sebesar Rp. 27.997.490.000,- dengan realisasi Rp. 26.540.114.971,- (94,79 %). Revisi DIPA dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali.

Tabel I.4 Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL
Pada KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
27.997.490.000	26.540.114.971	94,79 %	1.457.375.029

Sumber : Data Keuangan, 2020

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Selain dukungan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran, dukungan sarana dan prasarana juga mutlak diperlukan dalam pencapaian indikator kinerja. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap terus ditingkatkan, baik di kantor induk maupun di semua wilayah kerja. Jenis dan jumlah sarana/prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sampai 31 Desember 2020 adalah :

Tabel I.5 Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No.	Nama Barang	Kuantitas (m ²)	Alamat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	120	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	204	Jl. Perumnas Toddopuli V No.9 Makassar
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4000	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1230	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1360	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2531	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	800	Kel.Mangempang Kec.Barru Kab.Barru
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1000	Jl. Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12,160	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	672	Jl. Bandara Lama Kab. Maros
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1000	Jl. Hatta No.3 Makassar (Pelabuhan Makassar)
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1718	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	500	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	850	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	200,16	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	750	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
17	Rumah Negara Golongan II Type D	36	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare

Sumber : Data BMN 2020

Tabel I.6 Kendaraan Bermotor dan Alat Bermotor Lainnya
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Keterangan	Status
1	Station Wagon	Mitsubishi Pajero	1	Kendaraan Kepala Kantor	Baik
2	Kendaraan Penumpang Lainnya	Hino	1	Mobil Jemputan Pegawai	Baik
3	Mobil Ambulance	Mitshubishi L200	1	Ambulance Wilker Mamuju	Rusak Ringan
4	Mobil Ambulance	Mitshubishi L300	1	Ambulance Eks Awerange	Rusak Ringan
5	Mobil Ambulance	Izusu NHR55	1	Ambulance Bulukumba	Baik
6	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Kantor Induk	Baik
7	Mobil Ambulance	Suzuki PAV Arena	1	Ambulance Wilker Parepare	Baik
8	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Bandara	Baik
9	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Bandara	Baik
10	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Bajoe	Baik
11	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Awerange	Baik
12	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Mamuju	Baik
10	Kendaraan Klinik	Izusu 120 PS	1	Kendaraan Rongen	Rusak Berat
11	Kendaraan Taktis	Ford Ranger 2.9	1	Kendaraan Operasional	Baik
12	Kendaraan Taktis	Daihatzu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Rusak Berat
13	Kendaraan Taktis	Daihatzu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Baik
14	Kendaraan Taktis	Toyota Rush GM	1	Kendaraan Operasional	Baik

15	Kendaraan Taktis	Nissan Evalia	1	Kendaraan Operasional	Baik
16	Kendaraan Taktis	Toyota Rush 7-Seater	1	Kendaraan Operasional	Baik
17	Kendaraan Taktis	Toyota Rush 7 Sportivo	1	Kendaraan Operasional	Baik
18	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2	Kendaraan Operasional	Baik
19	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2	Kendaraan Operasional	Baik
20	Sepeda Motor	Honda Revo	2	Kendaraan Operasional	Baik
21	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	3	Kendaraan Operasional	Baik
22	Sepeda Motor	Honda Beat	3	Kendaraan Operasional	Baik
Jumlah			29	Unit	

Sumber : Data BMN, 2020

Tabel I.7 Peralatan Teknis
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah (unit)
1	Evaluation Suhu	6
2	Penyemprot Mesin (Sprayer)	23
3	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	9
4	Alat Pengasapan	3
5	Minor Surgical Set (alat kedokteran umum)	1
6	Diagnostik Set	1
7	Resusitasi Dewasa	3
8	Sunction Pump	3
9	Dental Chair	1

10	Dental Hand Instruments Set	1
11	Minor Surgeri Set	4
12	Oxygen Regulator	1
13	Lampu Gynaecology	2
14	Audiometer (alat kedokteran THT)	1
15	Portable Diagnostic (alat kedokteran THT)	1
16	Soundprocilbox (alat kedokteran THT)	1
17	Diagnostic Audio Metre	1
18	Elektrocardiograph (ecg) 1 chanel	2
19	Nebulizer	6
20	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	2
21	Ventilator Internal Medicine	1
22	Defibrilator	8
23	Ekg set	3
24	Alat Pengukur Kadar Air	1
25	Water test Kit	4
26	Alat Laboratorium Microbiology Set	1
27	Hematology Analyzer	1
28	Food Processor	1
29	Alat uji analisa logam-logam (spektofotometer)	1
30	Swing Fog	7
31	Thermal Scanner	7

Sumber : Data BMN, 2020

G. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) ORGANISASI

Beberapa permasalahan utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus menyewa ruangan.
2. Tenaga di wilker masih terbatas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan mewakili semua bidang dan bagian yang ada di induk.
3. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga pintu negara, terhadap pelaku perjalanan selama pandemi Covid 19 KKP Kelas I Makassar kekurangan tenaga dalam hal pengawasan, sehingga merekrut tenaga bantuan dari luar KKP Kelas I Makassar yang kompeten.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang meunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu, Kegiatan yang dilaksanakan di KKP harus mendukung program yang direncanakan pada Ditjen P2P.

Pada tahun 2018 indikator kinerja terdiri dari 14 indikator dan tahun 2019 terdiri dari 12 indikator yang menjadi penilaian terhadap kinerja KKP Kelas I Makassar yang dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1 Indikator Kinerja RAK
KKP Kelas I Makassar Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Target	
		2018	2019
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan	16402 Sertifikat	15715 Sertifikat
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100%	100%
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	1383 Dokumen	1253 Dokumen
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	9 Lokasi	9 Lokasi
5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	3 Lokasi	4 Lokasi
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	75000 Sertifikat	41630 Sertifikat

7	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	6 Lokasi	7 Lokasi
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	6 Lokasi	7 Lokasi
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	3630 Orang	2325 Orang
10	Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu	7 Lokasi	-
11	Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP	20 Tempat Kerja	-
12	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 Dokumen	48 Dokumen
13	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	16 Jenis	17 Jenis
14	Jumlah pengadaan sarana prasarana	8 Unit	232 Unit

Indikator kinerja untuk tahun 2019 hanya terdiri dari 12 indikator , 2 indikator yang tidak diperhitungkan adalah jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dan jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP, hal ini dikarenakan anggaran untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) tidak dianggarkan untuk KKP sesuai dengan petunjuk perencanaan (Jukren) tahun 2019.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

RKT merupakan penjabaran atau turunan dari RAK tahun 2020-2024. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam rangkaian lima tahun Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Kinerja Tahunan kemudian menjadi acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020, telah disusun indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel II.2 Indikator Kinerja RKT
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3.722.715
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85%
		4. Nilai kinerja anggaran	80
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	70
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

Sumber Data : RKT KKP Kelas I Makassar 2020

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku atasan langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3.722.715
		2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	85%
		4. Nilai kinerja anggaran	80
		5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6. Kinerja implementasi WBK Satker	70
		7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

Tabel II.4 Anggaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Rp . 4.683.036.000,-
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 23.314.454.000,-
	Total	Rp. 27.997.490.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Peningkatan kinerja dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan target serta membandingkannya dengan hasil tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja indikator tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi data capaian.

Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Pengukuran kinerja juga untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan tupoksi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RAK dan Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam indikator kinerja yakni Meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah.

Adapun indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar tahun 2020 tertera dalam tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 dan Indikator serta target RAP Ditjen P2P Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Indikator RAP Ditjen P2P	KKP Kelas I Makassar		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%	3.722.715	4.030.671	108,27%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		90%	100%	111,11%
3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara		85%	97,59%	114,81%
4	Nilai kinerja anggaran	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 95%	80	84,70	105,88%
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 95%	80%	100%	123,21%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Indeks reformasi birokrasi pada program pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit adalah 60	70	81,46	116,37%
7	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 95%	45%	51,13%	113,62%
Rata-Rata Capaian					113,32%

Berdasarkan tabel III.1 di atas ketujuh indikator KKP Kelas I Makassar tahun 2020 mencapai target di atas 100%, dengan rata-rata capaian sebesar 113,32%.

Capaian indikator tahun 2020 akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. INDIKATOR PERTAMA

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.722.715 yang terdiri dari :

- Pemeriksaan/ Penapisan orang sebanyak 3.688.194
- Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina sebanyak 33.146
- Pemeriksaan Barang sebanyak 425
- Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM} sebanyak 950

a. Pengertian

Jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

b. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun.

c. Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)

$$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan}}{\text{Jumlah target penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{4.030.671}{3.722.715} \times 100\% = 108,27\%$$

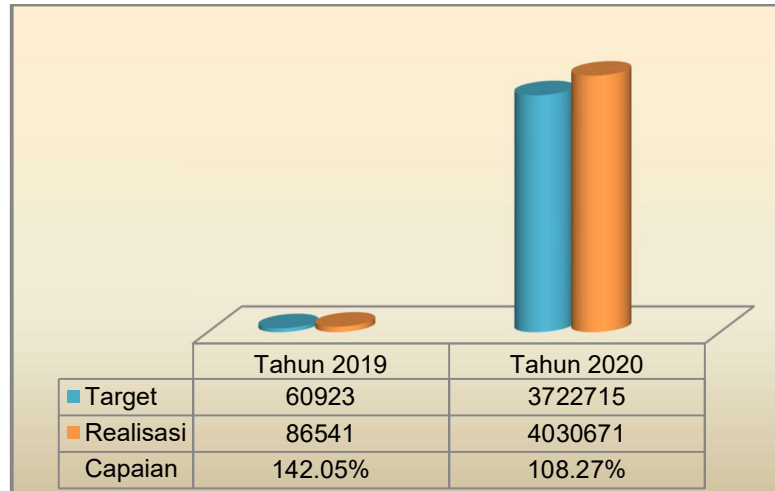
Pada tabel III.2 digambarkan capaian indikator terhadap target yang ditetapkan

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Item	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemeriksaan/ Penapisan orang	100%	3.688.194	3.992.725	108,26
	1. Jumlah Penumpang Pesawat Datang Diawasi		39.498	2.161.601	
	2. Jumlah Personil Pesawat dari LN dan dari Dalam Negeri yang Diawasi		84.203	117.183	
	3. Jumlah Awak dan Penumpang Kapal yang Diawasi		3.083	630.774	
	4. Jumlah SKLT		3.083	3.103	
	5. Jumlah Pengujian Kesehatan (Keur Kesehatan)		2.391	2.557	
	6. Pelayanan Vaksinasi		10.808	10.866	
	7. Deteksi Dini (TB, HIV, Pemeriksaan Rapid Test Covid 19)		3.500	5.066	
	8. Klirens dan Validasi Dokumen Kesehatan		844.711	1.061.575	
2	Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina		33.146	36.481	110,06
	1. Jumlah Kapal dari LN dan dari Daerah Terjangkit		3.788	4.164	
	2. Jumlah Pesawat dari LN dan dari Daerah Terjangkit		15.358	17.991	
	3. Jumlah PHQC		14.000	14.326	
3	Pemeriksaan Barang		425	438	103,06
	1. Surat Ijin Angkut Jenazah dan OMKABA		425	438	
4	Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}		950	1.027	108,11
	1. Jumlah TTU yang diperiksa		400	449	
	2. Jumlah TPM yang diperiksa		550	578	
Capaian Indikator 1			4.030.671	3.722.715	108,27

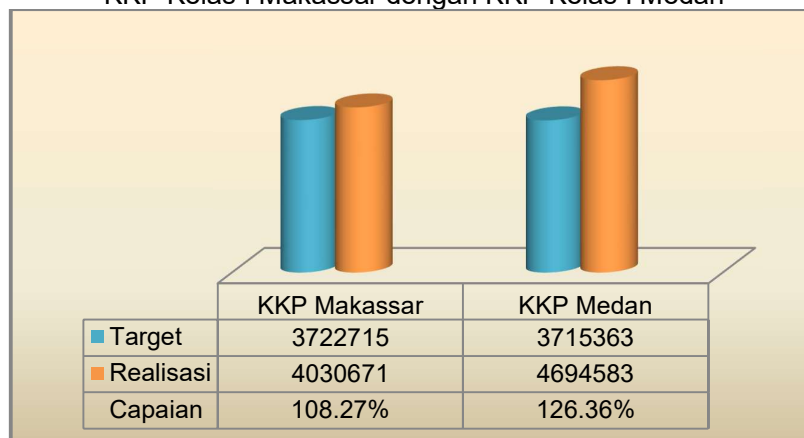
Berdasarkan tabel III.2 diketahui bahwa persentase capaian indikator mencapai 108,27%. Capaian kinerja lebih tinggi bila dibandingkan dengan target RAP.

Grafik III.1 Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas Makassar tahun 2019 dan tahun 2020



Dari grafik III.1 dapat dilihat bahwa pencapaian untuk indikator pada tahun 2019 dan tahun 2020 semuanya di atas target yang telah ditentukan. Indikator pada tahun 2019 sangat berbeda dengan tahun 2020, disebabkan karena tahun 2019 indikator lebih spesifik.

Grafik III.2 Perbandingan Capaian Indikator Ke-1 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Grafik III.2 tergambar bahwa untuk KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan capaian indikator ke-1 melebihi dari target yaitu 108,27%, dan 126,36%.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

Terdapat beberapa hal yang memberikan kontribusi terhadap tercapainya target Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan yakni :

- 1) Meningkatnya jumlah awak dan penumpang kapal disebabkan adanya skrining pengukuran suhu melalui thermal scanner dan thermal gun terhadap penumpang, personil pesawat dan awak kapal yang tiba dalam situasi pandemi Covid 19.
- 2) Meningkatnya pelayanan di Pelabuhan dan bandara karena proses validasi surat kesehatan bebas Covid 19 terhadap penumpang, personil pesawat, awak kapal dan pengguna jasa pelabuhan yang akan berangkat melalui pelabuhan dan bandara.
- 3) Pemeriksaan alat angkut yang lebih ketat tidak hanya dari luar negeri tetapi juga pada semua kapal/pesawat yang datang dari daerah terjangkit Covid 19.
- 4) Adanya penambahan sub indikator yang meliputi jumlah SKLT, Jumlah pengujian kesehatan (Keur Kesehatan), Pelayanan Vaksinasi, Deteksi Dini (TB, HIV, Pemeriksaan Rapid Test Covid 19), Klirens dan Validasi Dokumen.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Eksternal
 - a) Area penapisan yang jaraknya cukup pendek sehingga menimbulkan kepadatan penumpang saat dilakukan skrining suhu melalui thermal scanner
 - b) Masih ada agen kapal yang belum memahami proses kekarantinaan kesehatan dalam situasi pandemi Covid 19
 - c) Adanya kontraindikasi vaksinasi

- d) Terdapat beberapa orang yang tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
- e) Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 tentang Ketentuan Perjalanan orang dalam masa pandemi Pusat dan Daerah yang sering berubah sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan sosialisasi
- f) Regulasi terkait Penanganan Covid 19 kadang tidak sinergi.

2) Internal

- a) Ketersediaan tenaga yang masih kurang sehingga menyebabkan adanya beban kerja yang berlebihan
- b) Kendaraan operasional boarding belum terpenuhi untuk semua wilker
- c) Ruang pemeriksaan di terminal pelabuhan dan bandara semua wilayah kerja yang kurang memadai
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium.

g. Usul Pemecahan Masalah

1) Eksternal

- a) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait penempatan alat skrining thermal scanner yang tepat;
- b) Sosialisasi proses kekarantinaan kesehatan dalam situasi pandemi Covid 19;
- c) Diterbitkan surat keterangan tidak laik terbang sesuai dengan kondisi penumpang saat diperiksa, Rujuk ke RS Rujukan terdekat;
- d) Edukasi pelaku perjalanan tentang kontraindikasi vaksinasi, melakukan rujukan ke RS Rujukan;
- e) Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan.
- f) Perlu diadakan Sosialisasi oleh stakeholder khususnya Maskapai penerbangan Kepada pengguna jasa secepat mungkin setiap ada perubahan SE Satuan Tugas

Penanganan Covid 19 tentang Ketentuan Perjalanan orang dalam masa pandemi.

- 2) Internal
 - a) Penambahan tenaga teknis PNS dan Tenaga Relawan dalam masa pandemi Covid 19
 - b) Pengadaan kendaraan teknis operasional boarding (roda empat) untuk semua wilker
 - c) Menyediakan ruangan pemeriksaan sesuai dengan standar
 - d) Pengadaan sarana dan prasarana
 - e) Memberikan pelatihan teknis secara berkala.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

- 1) Penggunaan alat skrining (*thermal scanner*) dengan sistem sensor lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan operator yang banyak sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan secara maksimal dengan menjaga jarak aman.
- 2) Penerapan aplikasi online (Sinkarkes) dalam penerbitan dokumen kesehatan dapat mempersingkat waktu dalam penerbitan dan menyederhanakan alur pelayanan.
- 3) Penerimaan tenaga bantuan pengawasan pelaku perjalanan.

2. INDIKATOR KEDUA

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan pada tahun 2020 adalah sebesar 90%.

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan hasil dari pemeriksaan/penapisan orang, alat angkut sesuai satandar

kekarantinaan, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam periode satu tahun di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

b. Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)

c. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{\text{Persentase FR penyakit yang dikendalikan}}{\text{Persentase target FR penyakit yang dikendalikan}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{3.357}{3.357} \times 100\% = 100 \%$$

Pada tahun 2020 terdapat 3.261 pemeriksaan orang yang dikendalikan, 41 pemeriksaan alat angkut yang dikendalikan, 3 pemeriksaan barang yang dikendalikan, serta 52 pemeriksaan lingkungan yang dikendalikan dengan rincian yang terdapat pada tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3 Faktor Risiko Penyakit Yang Dikendalikan di wilayah layanan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko	Jumlah FR Yang Ditemukan	Jumlah FR Yang Ditindaki	Capaian %	Ket.
1	Pemeriksaan orang	3.261	3.261	100	Notifikasi, Rujukan dan Penumpang yang meninggal di Pesawat dan

					Kapal, SKTLT, Hasil Pengujian Kesehatan, Hasil Deteksi Dini TB, HIV, Covid 19, serta Validasi Dokumen
2	Pemeriksaan alat angkut	41	41	100	Penerbitan SSCC dan Tindakan Kapal Yang Dikarantina
3	Pemeriksaan barang	3	3	100	Pemeriksaan sampel makanan Kapal yang dikarantina dan izin angkut jenazah
4	Pemeriksaan lingkungan	52	52	100	TPM yang tidak memenuhi syarat sanitasi
Total		3.357	3.357	100	

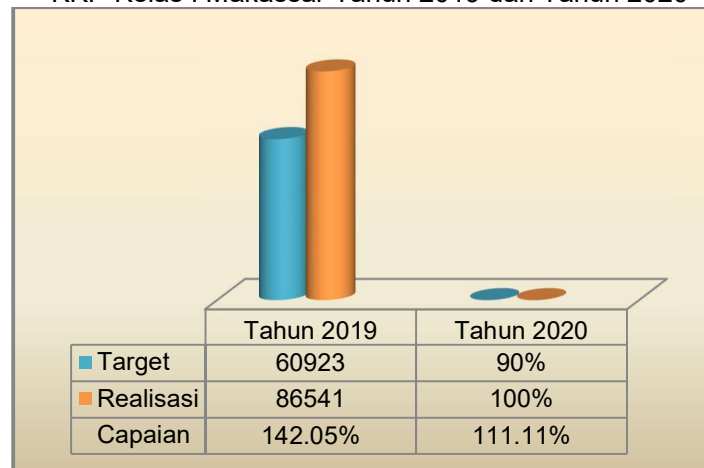
Sumber : data primer tahun 2020

Berdasarkan tabel III.3 diketahui ada 4 jenis kegiatan faktor risiko penyakit yang dikendalikan yaitu pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Faktor risiko yang terbanyak dikendalikan adalah hasil pemeriksaan orang berupa notifikasi, rujukan dan penumpang yang meninggal di pesawat maupun di kapal, SKTLT, hasil pengujian kesehatan, hasil deteksi dini TB, HIV, Covid 19, serta validasi dokumen kesehatan. Sedangkan yang terendah adalah hasil pemeriksaan barang berupa pemeriksaan sampel makanan kapal yang dikarantina dan izin angkut jenazah.

Tabel III.4 Perbandingan RAP dengan RAK Indikator Kedua KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

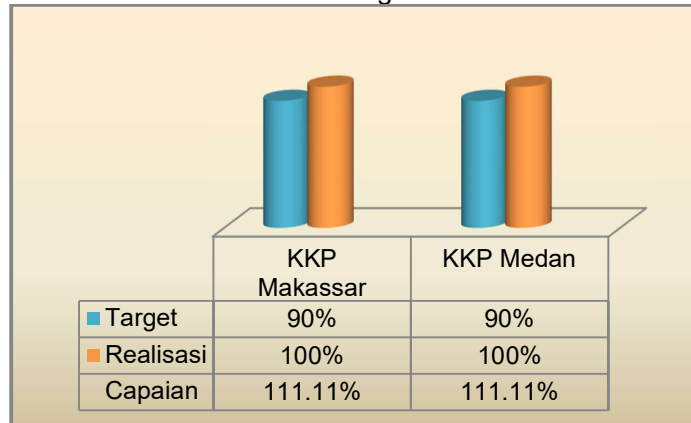
No	Jenis Sinyal	Target RAP	Target RAK	Jmlah Yang direspon < 24 Jam	Capaian %	Ket
1	Hasil skrining suhu >38	100 %	100 %	55	100	Notifikasi
2	Rumor			12	100	Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi
3	Hasil skrining suspek			20	100	Rujukan Suspek
4	Informasi Kedatangan Pengungsi			1	100	Penanganan Bencana
Total		100 %	100 %	88	100	

Grafik III.3 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dan Tahun 2020



Grafik III.3 menggambarkan capaian untuk indikator ke-2 untuk tahun 2019 dan 2020. Dimana untuk target dan realisasi agak berbeda di tahun 2019 dan 2020, karena indikator untuk tahun 2020 tidak spesifik seperti di tahun 2019.

Grafik III.4 Perbandingan Capaian Indikator Ke-2
KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Dari grafik III.4 di atas untuk KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan memperoleh capaian untuk indikator ke-2 sebesar 111,11%.

e. Analisa Keberhasilan Kegiatan

- 1) Keberhasilan dari capaian target merupakan kerja bersama dari tim gerak cepat KKP, Dinkes Provinsi Sulsel dan Sulbar, Dinkes Kab/Kota, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dan *Distric Surveilans Officer* di setiap Kab/Kota yang secara aktif membantu.
- 2) Bencana Pandemi Covid 19 meningkatkan jejaring kerja sama dengan lintas sektor dan lintas program dalam membantu dan memberikan informasi untuk penanganan dan mengantisipasi penyebaran Covid 19 di wilayah pelabuhan dan bandara.

f. Masalah yang dihadapi

Peraturan/edaran pemerintah pusat dan pemda dalam situasi bencana pandemi Covid 19 yang sering kali mengalami perubahan sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat sering terlambat yang

akhirnya berujung konflik dengan pengguna jasa pelabuhan dan bandara.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lintas sektor dan lintas program di pelabuhan dan bandara.
- 2) Segera mensosialisasikan peraturan dan edaran kepada pengguna jasa pelabuhan dan bandara.

h. Analisis Efisiensi Sumber daya

- 1) Adanya *Whatsapp Group* yang telah dibuat yang beranggotakan lintas sektor pelabuhan dan bandara, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, RSUP Wahidin Sudirohusodo serta dari KKP Kelas I Makassar yang memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dan bertukar informasi terutama dalam situasi pandemi Covid 19 yang mengharuskan kesiapsiagaan dalam penanganannya.
- 2) Penggunaan aplikasi elektronik *Health Allert Card (e HAC)* memudahkan layanan dan kemudahan memperoleh informasi kesehatan pengguna jasa pelabuhan dan bandara dalam kontak *tracing* dan *tracking* kasus Covid 19.
- 3) Adanya peran serta Satgas Penanganan Covid 19 di pelabuhan dan bandara.

3. INDIKATOR KETIGA

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Target Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara pada tahun 2020 adalah sebesar 85%.

a. Pengertian

Persentase status Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara selama periode satu tahun, berupa :

- 1) Kelengkapan Data Surveilans (Kelengkapan Data Surveilans Sampai Dengan Rekomendasi untuk Tiap-tiap Jabfung {Epid, Sanitarian, Entomolog, Dokter, Perawat, Lab, Kesehatan Kerja})
- 2) Jumlah Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam (Informasi/Sinyal Terkait Kasus Penyakit dan Bencana yang Diterima Terkait Pelaku Perjalanan dan Masyarakat Bandara/Pelabuhan/PLBD)
- 3) Penyusunan Rencana Kontigensi (Penyusunan Dokumen Renkon yang Baru {Kumulatif Dokumen Renkon --> Tidak Termasuk Reviuw})
- 4) Indeks Pinjal ≤ 1
- 5) HI perimeter = 0
- 6) Tidak Ditemukan Larva Anopheles
- 7) Kepadatan Kecoa Rendah < 2
- 8) Kepadatan Lalat < 2
- 9) TTU Memenuhi Syarat
- 10) TPM Laik Hygiene
- 11) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

b. Definisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus (cara perhitungan)

Akumulasi persentase target dan capaian:

1. Kelengkapan data surveilans
2. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam,
3. Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara

4. Indeks pinjal ≤ 1 (pelabuhan/bandara)
5. HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara)
6. Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara)
7. Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara)
8. Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara)
9. TTU memenuhi syarat (titik)
10. TPM layak higiene (titik)
11. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)

$$\frac{\text{Persentase Status FR}}{\text{Persentase Target Status FR}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{97,59}{85} \times 100\% = 114,81\%$$

Capaian kinerja pada indikator ini secara rinci disajikan pada tabel III.6 berikut ini :

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Item	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian (%)
1	Kelengkapan data Surveilans	100%	85%	100%	117,65
	1. Rekomendasi dari Jabfung				
2	Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam	100%	85%	100%	117,65
	1. Hasil skrining suhu $\geq 38^{\circ}$ C			100%	
	2. Hasil skrining suspek Covid 19			100%	
3	Penyusunan Rencana Kontigensi	100%	85%	100%	117,65
	1. Wilker Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Wilker Pelabuhan Belang-Belang			100%	
4	Indeks Pinjal ≤ 1	100%	85%	100%	117,65
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Bandara Hasanuddin			100%	
	4. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	5. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	6. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	7. Pelabuhan Malili			100%	
	8. Pelabuhan Palopo			100%	
	9. Pelabuhan Parepare			100%	
	10. Bandara Tumpa Padang			100%	

5	HI perimeter = 0	100%	85%	100%	117,65
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Bandara Hasanuddin			100%	
	4. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	5. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	6. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	7. Pelabuhan Malili			100%	
	8. Pelabuhan Palopo			100%	
	9. Pelabuhan Parepare			100%	
	10. Bandara Tamba Padang			100%	
6	Tidak Ditemukan Larva Anopheles	100%	85%	100%	117,65
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	4. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	5. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	6. Pelabuhan Malili			100%	
	7. Pelabuhan Palopo			100%	
	8. Pelabuhan Paotere			100%	
	9. Pelabuhan Parepare			100%	
	10. Pelabuhan Makassar			100%	
	11. Bandara Tamba Padang			100%	
7	Kepadatan Kecoa Rendah < 2	100%	85%	100%	117,65
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	4. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	5. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	6. Pelabuhan Malili			100%	
	7. Pelabuhan Palopo			100%	
	8. Pelabuhan Parepare			100%	
	9. Bandara Tamba Padang			100%	
8	Kepadatan Lalat < 2	100%	85%	100%	117,65
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Bandara Hasanuddin			100%	
	4. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	5. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	6. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	7. Pelabuhan Malili			100%	
	8. Pelabuhan Palopo			100%	
	9. Pelabuhan Parepare			100%	
	10. Bandara Tamba Padang			100%	
9	TTU Memenuhi Syarat	100%	85%	100%	117,65
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Paotere			100%	
	3. Pelabuhan Parepare			100%	
	4. Bandara Tamba Padang			100%	
	5. Pelabuhan Makassar			100%	
	6. Bandara Hasanuddin			100%	
10	TPM Laik Hygiene	100%	85%	81,82%	96,26
	1. Pelabuhan Awerange			100%	

	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Bandara Hasanuddin			100%	
	4. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	5. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	6. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	7. Pelabuhan Palopo			100%	
	8. Pelabuhan Paotere			0%	
	9. Pelabuhan Parepare			100%	
	10. Pelabuhan Makassar			0%	
	11. Bandara Tampa Padang			100%	
11	Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan	100%	85%	91,67%	107,85
	1. Pelabuhan Awerange			100%	
	2. Pelabuhan Bajoe			100%	
	3. Bandara Hasanuddin			100%	
	4. Pelabuhan Belangbelang			100%	
	5. Pelabuhan Biringkassi			100%	
	6. Pelabuhan Bulukumba			100%	
	7. Pelabuhan Malili			100%	
	8. Pelabuhan Palopo			100%	
	9. Pelabuhan Paotere			100%	
	10. Pelabuhan Parepare			100%	
	11. Pelabuhan Makassar			100%	
	12. Bandara Tampa Padang			0%	
Capaian Indikator 3		100%	85%	97,59%	114,81

1) Kelengkapan data Surveilans

Tabel III.6 terdapat rekomendasi yang dihasilkan untuk tiap rumpun jabatan fungsional teknis KKP Kelas I Makassar.

Tabel III.6 Rekomendasi Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Rumpun Jabatan	Bulan	Rekomendasi Yang dihasilkan
1	Sanitarian	Januari	1. Pengawasan TTU - setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU
			2. Pengawasan TPM Penyampaian rekomendasi perbaikan secara langsung ke pihak TPM sesuai dengan hasil observasi lapangan
			3. sanitasi alat angkut - setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat
			1. Pengawasan TTU
		Februari	1. Pengawasan TTU

	<p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. Pengawasan TPM</p> <p>Penyampaian rekomendasi perbaikan secara langsung ke pihak TPM sesuai dengan hasil observasi lapangan</p> <p>3. sanitasi alat angkut</p> <p>- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat</p>
Maret	<p>1. Pengawasan TTU</p> <p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. Pengawasan TPM</p> <p>Penyampaian rekomendasi perbaikan secara langsung ke pihak TPM sesuai dengan hasil observasi lapangan</p> <p>3. sanitasi alat angkut</p> <p>- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat</p>
April	<p>1. Pengawasan TTU</p> <p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. Pengawasan TPM</p> <p>Penyampaian rekomendasi perbaikan secara langsung ke pihak TPM sesuai dengan hasil observasi lapangan</p> <p>3. sanitasi alat angkut</p> <p>- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat</p>
Mei	<p>1. Pengawasan TTU</p> <p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. sanitasi alat angkut</p> <p>- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat</p>
Juni	<p>1. Pengawasan TTU</p> <p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. Pengawasan TPM</p> <p>Rekomendasi penerbitan sertifikat ke pihak TPM dan tembusan ke pihak Otoritas dan PT. AP</p> <p>3. sanitasi alat angkut</p>

	- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SCCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat
Juli	1. Pengawasan TTU
	- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU
	2. Pengawasan TPM
	Rekomendasi hasil temuan survey ke pihak TPM dan menyampaikan hasil pemeriksaan seluruh TPM ke Kantor Otoritas Wilayah V Mks dan PT. Angkasa Pura I Mks
	3. sanitasi alat angkut
	- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SCCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat
Agustus	1. Pengawasan TTU
	- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU
	2. Pengawasan TPM
	Rekomendasi temuan hasil survey ke pihak TPM
	3. sanitasi alat angkut
	- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SCCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat
September	1. Pengawasan TTU
	- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU
	2. Pengawasan TPM
	Rekomendasi temuan hasil survey ke pihak TPM
	3. sanitasi alat angkut
	- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SCCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat
Oktober	1. Pengawasan TTU
	- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU
	2. Pengawasan TPM
	Rekomendasi temuan hasil survey ke pihak TPM
	3. sanitasi alat angkut
	- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SCCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat
November	1. Pengawasan TTU

			<p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. Pengawasan TPM</p> <p>Rekomendasi temuan hasil survey ke pihak TPM</p> <p>3. sanitasi alat angkut</p> <p>- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat</p>
		Desember	<p>1. Pengawasan TTU</p> <p>- setelah dilakukan survey TTU, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi secara langsung tentang perbaikan sanitasi kepada pengelola TTU</p> <p>2. Pengawasan TPM</p> <p>Rekomendasi secara langsung ke pihak TPM tentang pengelolaan pangan kemasan (FIFO), makanan siap saji (layak/tidak layak konsumsi)</p> <p>3. sanitasi alat angkut</p> <p>- setelah dilakukan survey sanitasi alat angkut, menghasilkan rekomendasi berupa penerbitan sertifikat : SSCEC/ SSCC, PHQC. Alat angkut yang memenuhi syarat</p>
2	Entomolog	Januari	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
		Februari	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>

	<p>5. survey Nyamuk <i>Anopheles</i></p> <p>- setelah dilakukan survey nyamuk <i>Anopheles</i> ditemukan adanya nyamuk species <i>Anopheles</i> yang sebelumnya pernah terkonfirmasi sebagai vektor malaria. Maka diberikan rekomendasi kepada bidang PKSE untuk melakukan PE terkait potensi terjadinya penularan penyakit malaria di wilayah perimeter dan buffer Bandara</p>
Maret	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
April	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
Mei	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p>

	<p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
Juni	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (desinseksi dan deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p> <p>- melaksanakan pengendalian fogging untuk memutus siklus hidup nyamuk <i>Aedes aegypti</i></p>
Juli	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
Agustus	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p>

	<p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p> <p>5. survey Nyamuk <i>Anopheles</i></p> <p>- setelah dilakukan survey nyamuk <i>Anopheles</i> ditemukan adanya nyamuk species <i>Anopheles</i> yang sebelumnya pernah terkonfirmasi sebagai vektor malaria. Maka diberikan rekomendasi kepada bidang PKSE untuk melakukan PE terkait potensi terjadinya penularan penyakit malaria di wilayah perimeter dan buffer Bandara</p>
September	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (desinseksi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
Oktober	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p> <p>5. survey Nyamuk <i>Anopheles</i></p> <p>- setelah dilakukan survey nyamuk <i>Anopheles</i> ditemukan adanya nyamuk species <i>Anopheles</i> yang sebelumnya pernah terkonfirmasi sebagai vektor malaria. Maka diberikan rekomendasi kepada bidang PKSE untuk melakukan PE terkait potensi terjadinya penularan penyakit malaria di wilayah perimeter dan buffer Bandara</p>
November	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p>

			<p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p>
		Desember	<p>1. Survey Kepadatan lalat</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan lalat, diberikan rekomendasi berupa edukasi, dan tindakan pengendalian secara kimia berupa spraying.</p> <p>2. Survey kepadatan kecoa</p> <p>- setelah dilakukan survey kepadatan kecoa, menghasilkan rekomendasi berupa edukasi kepada pengelola tempat pengolahan makanan untuk perbaikan sanitasi dan upaya pengendalian</p> <p>3. Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut (deratisasi/ fumigasi)</p> <p>- penerbitan dokumen SSCC</p> <p>4. Survey jentik <i>Aedes aegypti</i></p> <p>- setelah dilakukan survey <i>Aedes aegypti</i>, menghasilkan rekomendasi tindakan pengendalian dengan larvasidasi.</p> <p>- melaksanakan pengendalian fogging untuk memutus siklus hidup nyamuk <i>Aedes aegypti</i></p>
3	Epidemiolog	Januari	<p>1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar</p> <p>2. Rekomendasi ke LS / LP terkait eliminasi malaria 2025</p> <p>3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)</p> <p>4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC</p>
		Februari	<p>1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar</p> <p>2. Rekomendasi ke LS / LP terkait eliminasi malaria 2025</p> <p>3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)</p> <p>4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC</p>
		Maret	<p>1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar</p> <p>2. Rekomendasi penatalaksanaan kasus pada jamaah umroh</p> <p>3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)</p> <p>4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid dr China</p> <p>5. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC</p>
		April	<p>1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar</p> <p>2. Rekomendasi penatalaksanaan kekarantinaan kesehatan (SOP Restricted Fratique)</p>

			3. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid di internal KKP (SOP)
			4. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			5. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid di Eksternal KKP (SOP)
			6. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	Mei		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi penatalaksanaan kekarantina kesehatan (SOP)
			3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid di Eksternal KKP (SOP)
	Juni		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			3. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	Juli		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi ke LS / LP terkait eliminasi malaria 2025
			3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid di Eksternal KKP (SOP)
			5. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	Agustus		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			3. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	September		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			3. Rekomendasi ke LS / LP terkait eliminasi malaria 2025
			4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	Oktober		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			3. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	November		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid di internal KKP (SOP)
			3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
	Desember		1. Rekomendasi ke PKM Buffer 10 penyakit terbesar
			2. Rekomendasi penatalaksanaan kasus Covid di internal KKP (SOP)
			3. Rekomendasi ke Dinkes setempat (wilayah)
			4. Rekomendasi penatalaksanaan kasus PHEIC
4	Dokter	Januari	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat
			4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher

	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
	10. Rekomendasi pemeriksaan TB
Februari	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
	10. Rekomendasi pemeriksaan TB
Maret	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
April	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
Mei	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher

	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
Juni	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
Juli	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
Agustus	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
September	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute

			7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
			8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
			9. Pastikan kesesuaian identitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		Oktober	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat
			4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
			5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
			6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
			7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
			8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
			9. Pastikan kesesuaian identitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
			10. Rekomendasi pemeriksaan TB
		November	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat
			4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
			5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
			6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
			7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
			8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
			9. Pastikan kesesuaian identitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
			10. Rekomendasi pemeriksaan TB
			11. Jika ditemukan peserta screening dengan hasil pemeriksaan R1, R2, R3 reaktif dirujuk ke Puskesmas Buffer untuk pengobatan
		Desember	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat
			4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
			5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
			6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
			7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
			8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
			9. Pastikan kesesuaian identitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
			10. Rekomendasi pemeriksaan TB
5	Perawat	Januari	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat

		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
		6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
		8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
		9. Pastikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
		11. Rekomendasi untuk observasi
		12. Rekomendasi Edukasi
	Februari	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
		2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
		3. Layak terbang dengan obat
		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
		6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
		8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
		9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		10. Konseling
		11. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
		12. Rekomendasi untuk observasi
		13. Rekomendasi Edukasi
	Maret	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
		2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
		3. Layak terbang dengan obat
		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
		6. Rujuk dengan menggunakan register sistrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
		8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
		9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
		11. Rekomendasi untuk observasi
		12. Rekomendasi Edukasi
	April	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
		2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
		3. Layak terbang dengan obat
		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai

		6. Rujuk dengan menggunakan register sisrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
		8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
		9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
		11. Rekomendasi untuk observasi
		12. Rekomendasi Edukasi
	Mei	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
		2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
		3. Layak terbang dengan obat
		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
		6. Rujuk dengan menggunakan register sisrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
		8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
		9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
		11. Rekomendasi untuk observasi
		12. Rekomendasi Edukasi
	Juni	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
		2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
		3. Layak terbang dengan obat
		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
		6. Rujuk dengan menggunakan register sisrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
		8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
		9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
		10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
		11. Rekomendasi untuk observasi
		12. Rekomendasi Edukasi
	Juli	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
		2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
		3. Layak terbang dengan obat
		4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
		5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
		6. Rujuk dengan menggunakan register sisrute
		7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk

	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
	10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
	11. Rekomendasi untuk observasi
	12. Rekomendasi Edukasi
Agustus	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
	10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
	11. Rekomendasi untuk observasi
	12. Rekomendasi Edukasi
September	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
	10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
	11. Rekomendasi untuk observasi
	12. Rekomendasi Edukasi
Oktober	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
	2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
	3. Layak terbang dengan obat
	4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
	5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
	6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
	7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
	8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
	9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi

			10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
			11. Rekomendasi untuk observasi
			12. Rekomendasi Edukasi
		November	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat
			4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
			5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
			6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
			7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
			8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
			9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
			10. Konseling
			11. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
			12. Rekomendasi untuk observasi
			13. Rekomendasi Edukasi
		Desember	1. Layak terbang dengan pendampingan petugas
			2. Layak terbang dengan penggunaan oksigen
			3. Layak terbang dengan obat
			4. Layak terbang dengan penggunaan wheelchair/strecher
			5. Rujuk ke fasyankes yang lebih memadai
			6. Rujuk dengan menggunakan register sirsute
			7. Evakuasi dan rujukan dengan memperhatikan kebutuhan saat merujuk
			8. Untuk kontraindikasi vaksin dikonsul ke dokter spesialis
			9. Patikan kesesuaian indentitas sudah tepat saat sebelum vaksinasi
			10. Rekomendasi pemeriksaan ulang HIV
			11. Rekomendasi untuk observasi
			12. Rekomendasi Edukasi
6	Laboran	Januari	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
			2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
			3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
		Februari	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
			2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
			3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa

Maret	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
April	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
Mei	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
Juni	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
	2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
	3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
Juli	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
Agustus	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
	2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
	3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
September	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
	2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
	3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
Oktober	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
	2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
	3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
November	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi
	2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
	3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
Desember	1. Jika ada kerusakan pada plano test maka direkomendasikan untuk pengadaan reagen yang tingkat akurasi lebih tinggi

			2. Jika ditemukan peserta screening HIV reaktif maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan R1, R2, R3
			3. Jika R1, R2, R3 reaktif maka direkomendasikan untuk konseling ke dokter pemeriksa
7	Pembimbing K3	Januari	1. Rekomendasi penyediaan APD
			2. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya
		Februari	1. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas
			2. Rekomendasi penyediaan APD
		Maret	3. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya
			1. Rekomendasi penyediaan APD
		April	2. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas
			3. Desinfeksi pesawat
			1. Rekomendasi penyediaan APD
		Mei	2. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas
			3. Desinfeksi pesawat
			4. Pengamatan tempat kerja
			1. Rekomendasi penyediaan APD
		Juni	2. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas
			3. Desinfeksi pesawat
			4. Pengamatan tempat kerja
			1. Rekomendasi penyediaan APD
		Juli	2. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas
			3. Desinfeksi pesawat
			4. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas
			1. Rekomendasi penyediaan APD
		Agustus	2. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya
			1. Rekomendasi penyediaan APD
		September	2. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya
	1. Rekomendasi penyediaan APD		
	Oktober	2. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya	
		1. Edukasi petugas dan pekerja tentang potensi bahaya dalam pelaksanaan tugas	
	November	2. Rekomendasi penyediaan APD	
		3. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya	
		1. Rekomendasi penyediaan APD	
	Desember	2. Rekomendasi hirarki pengendalian potensi bahaya	

2) Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 Jam

Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dapat dilihat dalam tabel III.7

Tabel III.7 Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 Jam pada Indikator Ketiga KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Jenis Sinyal	Target	Target RAK	Jmlah Yang direspon < 24 Jam	Capaian %	Ket
1	Hasil skrining suhu $\geq 38^{\circ}$ C	85 %	85 %	520	117.65	Notifikasi
2	Hasil skrining suspek Covid 19			20	117.65	Rujukan Suspek
3	Karantina KM. Lambelu			1	117,65	Penanganan kasus Covid 19
Total		85 %	85 %	541	117,65	

Berdasarkan tabel III.7 diketahui bahwa jenis sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam terbanyak adalah hasil skrining suhu $\geq 38^{\circ}$ C dalam rangka Covid 19 yaitu 520 notifikasi. Notifikasi dibuat dan dikirim kurang dari 24 jam ke email/*whatsapp* grup Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota dan KKP wilayah tujuan maupun asal dan ditembuskan ke Ditjen P2P dan *Public Health Operation Emergency Centre* (PHOEC). Sedang yang terendah adalah kegiatan kekarantinaan kesehatan yaitu penanganan kasus positif Covid 19 di KM. Lambelu.

3) Penyusunan Rencana Kontinjensi

Hingga tahun 2020, wilker KKP Kelas I Makassar yang telah memiliki dokumen rencana kontinjensi sebanyak 9 (Sembilan) Wilker/Pos. Dapat dilihat dalam tabel III.8

Tabel III.8 Penyusunan Renkon di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar

No	Wilker	Yang sudah memiliki Renkon	Yang blm memiliki Renkon	Ket
1	Pelabuhan Makassar	√		5 Nop 2018
2	Bandara SHIAM	√		28 Juni 2019

3	Pelabuhan Biringkassi		√	
4	Pelabuhan Awerange	√		23 Sept 2020
5	Pelabuhan Parepare	√		18 Okt 2018
6	Pelabuhan Bajoe	√		6 Nop 2019
7	Pelabuhan Palopo	√		Feb 2019
8	Pelabuhan Malili		√	
9	Pelabuhan Belangbelang Mamuju	√		20 Sept 2019
10	Pelabuhan Pasangkayu	√		6 Maret 2020
11	Bandara Tampa Padang		√	
12	Pos Pelabuhan Bira-Bulukumba		√	
13	Pos Pelabuhan Paotere	√		5 Nop 2018
Total		9	4	

Berdasarkan Tabel III.8 ada 9 wilker yang sudah memiliki Renkon dari 13 wilker yang ada. Masih ada 4 wilker yang belum memiliki Renkon. Hal ini disebabkan karena anggaran pelaksanaan Renkon cukup besar sehingga mempertimbangkan skala prioritas wilker mana yang perlu didahulukan dalam pelaksanaannya. Pada umumnya yang telah memiliki Renkon adalah pelabuhan yang cukup tinggi jumlah kedatangan kapal/pesawat dari luar negeri maupun dalam negeri. Sedangkan yang belum memiliki Renkon masih ada 4 wilker yaitu wilker Pelabuhan Biringkassi, Pelabuhan Malili, Bandara Tampa Padang dan Pos Pelabuhan Bira yang akan diusulkan ditahun berikutnya sesuai ketersediaan anggaran.

Tabel III.9 Penyesunan Renkon di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar Pada Indikator Ketiga KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Wilker	Target	Realisasi	Target RAK	Capaian %	Ket
1	Pelabuhan Pasangkayu	85%	100%	85%	117,65	

			(dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020)			
2	Pelabuhan Awerange	85%	100% (dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020)	85%	117,65	
	Total	85%	100%		117,65	

Berdasarkan Tabel III.9 terdapat 2 wilker yang menjadi target pelaksanaan penyusunan dokumen Renkon yaitu Wilker Pelabuhan Belangbelang dengan pelaksanaan di Pelabuhan Pasang Kayu serta Wilker Pelabuhan Awerange dan mencapai target dengan diadakannya penyusunan Renkon di Pelabuhan Pasang Kayu pada tang 6 Maret 2020 dan Pelabuhan Awerange pada tanggal 23 September 2020.

4) Indeks Pinjal ≤ 1

Nilai indeks pinjal di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel III.10 di bawah ini.

Tabel III.10 Nilai Indeks Pinjal di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai Indeks pinjal ≤ 1	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0,9	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bandara Tampapadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berdasarkan Tabel III.10 pada tahun 2020 tidak didapatkan indeks pinjal melebihi baku mutu yang dipersyaratkan pada 10 wilayah kerja yang ditargetkan dari pemasangan *trapping* yang dilakukan di wilayah kerja KKP. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pinjal di Wilayah Kerja KKP memenuhi syarat setiap bulannya. Sepanjang tahun 2020 jumlah tikus tertangkap sebanyak 344 ekor, setiap tikus yang tertangkap dilakukan identifikasi dan penyisiran kemudian dipisahkan antara pinjal umum dan pinjal *Xenopsylla cheopis*. Selanjutnya dilakukan perhitungan indeks pinjal. Dari hasil tersebut ditemukan indeks pinjal yang lebih tinggi dari biasanya tapi masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. Pada bulan Januari ditemukan indeks pinjal 0,9 pada wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan/ iklim dimana pada bulan Januari curah hujan tinggi sehingga kelembaban lebih tinggi dari biasanya. Pinjal merupakan parasit temporal yaitu berada dalam tubuh hospes saat membutuhkan makan. Pinjal yang tidak mendapatkan makanan tidak dapat hidup dalam lingkungan kering, tetapi pada lingkungan lembab maka pinjal dapat hidup berbulan-bulan. Sanitasi dan keberadaan sumber makanan berpengaruh terhadap populasi tikus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan tikus di bandara dominan ditemukan di area *Sewage Treatment Plant* Angkasa Pura (STP-AP), di tempat pembuangan sampah sementara, dan area cargo Bandara. Banyaknya tumpukan sampah di area STP-AP bandara menjadi tempat yang disukai tikus untuk mencari sisa-sisa makanan, selain itu keberadaan tikus pada area cargo dipengaruhi oleh adanya sumber makanan pada area tersebut sehingga menjadi tempat yang disukai oleh tikus untuk mencari makan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

capaian kinerja Nilai Indeks pinjal ≤ 1 pada tahun 2020 mencapai 100%.

5) HI perimeter = 0

Distribusi HI=0 di Wilker KKP Kelas I Makassar tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel III.11.

Tabel III.11 House Indeks di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	Bandara Hasanuddin	1,8	3,7	1,8	1,8	1,8	3,6	1,8	0	0	0	3,6	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0,15	0,21	0,19	0,14	0,13	0,14	0,18
	Pelabuhan Biringkassi	7,69	7,69	15,38	15,38	15,38	15,38	7,69	7,69	7,69	0	0	0
	Pelabuhan Bulukumba	3	6,4	2,1	2,6	0	6,9	4	0	4,2	9,5	6,3	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	1,1	0	1,1	3,3	0	0	1,1	33,33	22,22	22,22	10	27,27
	Bandara Tampapadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III.11 pada tahun 2020 dari 10 wilayah kerja yang dijadikan target dengan angka House indeks = 0 ditemukan 4 wilayah kerja dengan angka house indeks yang sesuai baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan tabel III.11 menunjukkan adanya wilayah kerja dengan angka house indeks memenuhi syarat sepanjang tahun 2020 dan pada wilayah kerja lainnya terjadi adanya fluktuasi pada hasil survey setiap bulannya.


Pada wilayah kerja Pelabuhan Bajoe menunjukkan hasil pengamatan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, ini terlihat pada bulan Oktober. Apabila dilihat dari hasil survey ditemukan 1 bangunan yang positif dari 25 bangunan yang ada di *perimeter*

area. Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu larvasidasi pada container yang positif dan dilakukan tindakan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa.

Pada beberapa wilayah kerja ditemukan *house indeks* di perimeter area yang tinggi sepanjang tahun 2020 hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kontainer yang jarang dibersihkan dan tidak ditutup oleh pemiliknya, selain itu keberadaan kontainer terbuka berupa barang bekas dan wadah yang ada diluar bangunan berpotensi menjadi tempat yang potensial sebagai tempat perindukan setelah hujan. Khusus di perimeter area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menunjukkan hasil pengamatan yang fluktuasi setiap bulannya, HI perimeter di atas 0 pada beberapa bulan. Rata-rata jentik ditemukan pada tempat penampungan dispenser. Penampungan dispenser merupakan container yang paling jarang dibersihkan oleh pemilik dan tanpa disadari tempat tersebut menjadi container perindukan dari jentik *Aedes aegypti*. tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu mengedukasi pemilik bangunan untuk membersihkan kontainer-kontainer yang potensial sebagai tempat perindukan. Selain itu dilakukan larvasidasi pada kontainer yang positif sehingga indeks yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan ditekan sampai dengan house indeks = 0 selanjutnya dilakukan tindakan fogging untuk pengendalian nyamuk dewasa. Tindakan pengendalian dilakukan pada periode dimana ditemukan angka house indeks >0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai house indeks = 0 pada tahun 2020 mencapai 100%. Berikut hasil pengamatan setelah tindakan pengendalian dilakukan pada wilayah kerja dengan house indeks diatas 0.

Tabel III.12 Faktor Risiko yang telah dikendalikan (house indeks >0) Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
HI Perimeter = 0	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Faktor Risiko yang dikendalikan

6) Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Keberadaan larva Anopheles sp di Wilker KKP Kelas I Makassar tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel III.13

Tabel III.13 Keberadaan larva *Anopheles sp* di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Tidak Ditemukan Larva Anopheles	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampapadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III.13 pada tahun 2020 dari 11 wilayah kerja yang dijadikan target bebas dari larva *Anopheles* semua wilayah kerja yang ditargetkan sesuai baku mutu yang dipersyaratkan. Hasil pengamatan Larva *Anopheles* diseluruh wilayah kerja KKP yang dijadikan target tidak ditemukan adanya larva *Anopheles*. Keadaan geografis dan Letak wilayah kerja yang berada di wilayah perkotaan atau wilayah padat penduduk mempengaruhi keberadaan habitat perkembangbiakan nyamuk *Anopheles*. Selain itu keberadaan predator pada habitat yang potensial sebagai habitat larva *Anopheles* sangat berpengaruh terhadap keberadaan larva *Anopheles* pada suatu wilayah. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100%.

Untuk area yang masih ditemukan adanya larva *Anopheles* mulai tahun 2021 dilakukan pengendalian larvasida biologi yaitu *bacillus thuringiensis israelensis (BTI)* dengan cara menyemprotkan larvasida tersebut ke habitat yang ditemukan adanya larva *Anopheles*.

7) **Kepadatan Kecoa Rendah < 2**

Distribusi kepadatan kecoa di Wilker KKP Kelas I Makassar tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel III.14.

Tabel III.14 Kepadatan Kecoa di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kepadatan Kecoa Rendah < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	1	2	1	0	1	4	0	1	0	0	1	0
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Pelabuhan Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	17	13	15	17	98
	Bandara Tampapadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan Tabel III.14 pada tahun 2020 dari 9 wilayah kerja yang dijadikan target dengan angka kepadatan kecoa rendah < 2 ditemukan 6 wilayah kerja dengan angka kepadatan sesuai baku mutu yang dipersyaratkan. Dilihat dari data diatas menunjukkan adanya wilayah kerja dengan hasil kepadatan memenuhi syarat sepanjang tahun 2020 dan pada wilayah kerja lainnya terjadi adanya fluktuasi kepadatan pada pengamatan setiap bulannya, metode pengamatan yang digunakan yaitu menggunakan trapping jenis perangkap lem (*sticky trap*), selain digunakan sebagai media pengamatan juga digunakan sebagai bentuk pengendalian yaitu mengurangi investasi kecoa pada lokasi pengamatan.

Pada wilayah kerja bajoe menunjukkan hasil pengamatan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, ini terlihat pada bulan Februari dan Juni. Kondisi ini dipengaruhi oleh sanitasi yang

kurang baik pada beberapa tempat pengolahan makanan sehingga ini berpengaruh pada tingginya indeks kepadatan kecoa.

Pada wilayah kerja Biringkassi menunjukkan hasil pengamatan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, ini terlihat pada bulan Nopember sampai Desember. Sama halnya dengan wilayah kerja Parepare menunjukkan hasil pengamatan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, ini terlihat pada bulan Agustus sampai Desember. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kondisi sanitasi pada tempat – tempat pengolahan makanan yang dilakukan pengamatan. Tindakan pengendalian yaitu selain dengan pemasangan trapping juga penyuluhan mengenai pengelolaan sanitasi tempat pengolahan makanan yang baik. Setelah dilakukan pemasangan perangkap lem (*sticky trap*) tidak ditemukan adanya kecoa pada lokasi pemasangan perangkap sehingga kepadatan kecoa < 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kepadatan kecoa < 2. Pada tahun 2020 mencapai 100%.

Berikut hasil pengamatan setelah tindakan pengendalian dilakukan pada wilayah kerja dengan kepadatan kecoa ≥ 2 dalam tabel III.15.

Tabel III.15 Faktor Risiko yang Telah Dikendalikan (kepadatan kecoa ≥ 2) di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kepadatan Kecoa Rendah < 2	Pelabuhan Bajoe	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Faktor Risiko yang dikendalikan

8) Kepadatan Lalat < 2

Distribusi kepadatan lalat di Wilker KKP Kelas I Makassar tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel III.16.

Tabel III.16 Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kepadatan Lalat < 2	Pelabuhan Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bajoe	3	1	2	1	6	3	2	1	7	1	1	6,88
	Bandara Hasanuddin	7	6	4	5	4	5	4	7	7	7	18	17
	Pelabuhan Belangbelang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bulukumba	2	2	2	2	2	2	2	2	1	9	6	2
	Pelabuhan Malili	1,8	1,6	1,2	1,4	1,8	1,6	1,8	1,4	2	1,8	0	1,6
	Pelabuhan Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	1,6
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	35	38	22	25	20
	Bandara Tampapadang	1,8	2	1,6	0	0	0	4	2	1,8	2	4,8	5

Berdasarkan Tabel III. 16 pada tahun 2020 dari 10 wilayah kerja yang dijadikan target dengan angka kepadatan lalat < 2 ditemukan 4 wilayah kerja dengan angka kepadatan sesuai baku mutu yang dipersyaratkan. Dilihat dari data diatas menunjukkan adanya wilayah kerja dengan hasil kepadatan memenuhi syarat sepanjang tahun 2020 dan pada wilayah kerja lainnya terjadi adanya fluktuasi kepadatan pada pengamatan setiap bulannya, metode pengamatan yang digunakan yaitu menggunakan *fly grill*.

Pada beberapa wilayah kerja menunjukkan hasil pengamatan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, Kondisi ini dipengaruhi oleh buruknya sanitasi dan sarana tempat pembuangan sampah sementara yang tidak tertutup dan tidak dipilah. Selain itu

rentang waktu pengambilan sampah yang tidak rutin mengakibatkan terjadinya *over capacity*, sampah yang menumpuk dan terlambat diangkut akan menimbulkan bau dan mengakibatkan banyaknya lalat sehingga pada saat dilakukan pengamatan diperoleh angka kepadatan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu memberikan penyuluhan kepada pengelola pelabuhan/ bandara untuuk perbaikan sanitasi untuk mengurangi kepadatan lalat diwilayah tersebut sehingga kepadatan lalat bias ditekan sampai dengan baku mutu yang dipersyaratkan. Selain itu dilakukan pengendalian secara kimia yaitu spraying. Tindakan pengendalian dilakukan pada periode dimana ditemukan indeks yang tidak sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan tindakan pengendalian maka indeks kepadatan yang melebihi baku mutu ditekan sehingga kepadatan lalat < 2 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kepadatan lalat < 2 . Pada tahun 2020 mencapai 100%.

Berikut hasil pengamatan setelah tindakan pengendalian dilakukan pada wilayah kerja dengan kepadatan lalat lebih ≥ 2 .

Tabel III.17 Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 setelah dilakukan Tindakan pengendalian

Indikator	Wilayah Kerja	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kepadatan Lalat < 2	Pelabuhan Bajoe	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
	Bandara Hasanuddin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelabuhan Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Pelabuhan Malili	1,8	1,6	1,2	1,4	1,8	1,6	1,8	1,4	0	1,8	0	1,6
	Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bandara Tampapadang	1,8	0	1,6	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0

 Faktor Risiko yang dikendalikan

9) Tempat Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat

Untuk distribusi hasil pemeriksaan sanitasi TTU di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar, dapat dilihat dalam Tabel III.18

Tabel III.18 Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi TTU di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Nama Wilayah Kerja	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	%
Pelabuhan Awerange	36	0	100,00
Pelabuhan Paotere	8	0	100,00
Pelabuhan Parepare	24	0	100,00
Bandara Tamba Padang	2	0	100,00
Pelabuhan Makassar	24	0	100,00
Bandara Hasanuddin	37	0	100,00

Berdasarkan tabel III.18 di atas bahwa wilayah yang melakukan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum dan seluruhnya yang memenuhi kriteria mencapai 80% sebanyak 6 (enam) wilayah kerja (target capaian 100%). Pemeriksaan TTU dalam pelaksanaan dan penyampaian laporan disatukan dalam laporan

sanitasi gedung/bangunan. Pengawasan sanitasi gedung/bangunan/TTU dilakukan sebanyak 449 sarana yang dilaksanakan di seluruh wilker KKP Kelas I Makassar, diantaranya 131 sarana yang dilaksanakan pada 6 (enam) wilker yang melakukan pengawasan factor risiko penyakit pada TTU.

10) Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Hygiene

Distribusi hasil pemeriksaan Sanitasi TPM di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar dapat dilihat dalam tabel III.19.

Tabel III.19 Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi TPM di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Nama Wilayah Kerja	Laik Hygiene	Tidak Laik Hygiene	%
Pelabuhan Awerange	24	0	100,00
Pelabuhan Bajoe	33	0	100,00
Pelabuhan Belang-Belang	12	0	100,00
Pelabuhan Biringkassi	12	0	100,00
Pelabuhan Bulukumba	31	0	100,00
Pelabuhan Palopo	23	0	100,00
Pelabuhan Paotere	40	13	75,47
Pelabuhan Parepare	99	0	100,00
Bandara Tamba Padang	18	0	100,00
Pelabuhan Makassar	83	36	69,75
Bandara Hasanuddin	151	3	98,05

Berdasarkan tabel III. 19 di atas dapat dilihat bahwa jumlah wilker yang melaksanakan pengawasan TPM sebanyak 11 wilker. TPM laik hygiene yang memenuhi syarat mencapai 80% kecuali pada Pelabuhan Makassar yang hanya mencapai 69,75% dan Pelabuhan Paotere 75,74%. Sehingga dalam hal ini hanya 9 (sembilan) wilker yang telah mencapai target.

Hasil pemeriksaan sanitasi TPM ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil pengawasan faktor risiko kesehatan serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil temuan yang tidak memenuhi syarat.

TPM yang tidak laik hygiene yang terdapat di Pelabuhan Makassar merupakan TPM dengan kategori makanan jajanan. Konsep awal bangunan yang telah disediakan oleh Pihak PT. Pelindo IV Makassar merupakan sentra makanan jajanan dan tidak diperkenankan untuk melakukan proses pengolahan pangan. Namun pada saat proses operasi terdapat beberapa *outlet* yang mengolah pangan dengan penyediaan fasilitas yang tidak lengkap, seperti penyediaan air bersih, penanganan air limbah, pengelolaan sampah serta objek lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan pangan.

Produksi sampah baik padat maupun cair dari hasil aktivitas TPM akan menjadi sumber datangnya vektor dan binatang pembawa penyakit sebagai *vehicle*/transpor penyakit dari lingkungan ke manusia.

Sedangkan TPM yang ada di Pelabuhan Paotere merupakan TPM dengan kategori makanan jajanan. Kondisi sarana yang ada Pelabuhan Rakyat Paotere pada umumnya menggunakan bangunan semi permanen dengan kondisi yang tidak bebas dari faktor risiko penular penyakit.

11) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Distribusi hasil pemeriksaan kualitas air bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020, dapat dilihat dalam Tabel III.20.

Tabel III.20 Distribusi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Bersih di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Nama Wilayah Kerja	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	%
Pelabuhan Awerange	36	0	100,00
Pelabuhan Bajoe	10	0	100,00
Pelabuhan Belang-Belang	12	0	100,00
Pelabuhan Biringkassi	12	0	100,00
Pelabuhan Bulukumba	31	0	100,00
Pelabuhan Malili	11	0	100,00
Pelabuhan Palopo	2	0	100,00
Pelabuhan Paotere	22	0	100,00
Pelabuhan Parepare	9	0	100,00
Bandara Tampa Padang	12	12	50,00
Pelabuhan Makassar	42	0	100,00
Bandara Hasanuddin	43	0	100,00

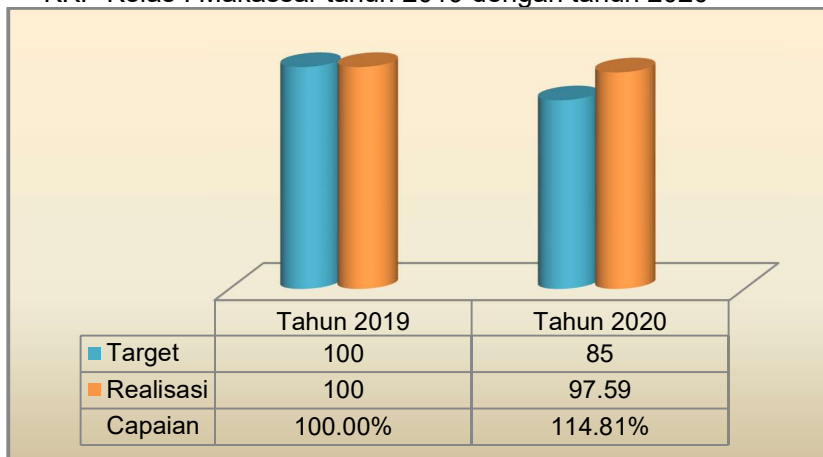
Berdasarkan tabel III.20 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 wilker yang melaksanakan pengawasan kualitas air bersih, 1 (satu) diantaranya terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu Pos Pelabuhan Simboro Wilker Bandara Tampa Padang (50%).

Pengawasan kualitas air bersih dilakukan secara rutin maupun berkala terhadap faktor risiko yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit. Pengawasan dilakukan berupa pengambilan sampel air pada sarana air bersih dengan beberapa titik pengambilan (disesuaikan kondisi sarana). Sampel air bersih dilakukan pemeriksaan sesaat di lapangan terlebih dahulu dengan parameter fisik dan kimia, selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tolak ukur dari indikator ini adalah parameter fisik sebagai pemeriksaan dasar yang dilakukan di lapangan.

Kualitas air bersih yang tidak memenuhi syarat akan ditelaah dengan melihat kondisi fisik sarana dan lingkungan sekitar. Sarana air bersih tidak boleh dekat dengan sumber cemaran, minimal 10 meter dari cemaran biologis dan 75 meter dari cemaran kimia. Kualitas air bersih dapat juga dipengaruhi oleh

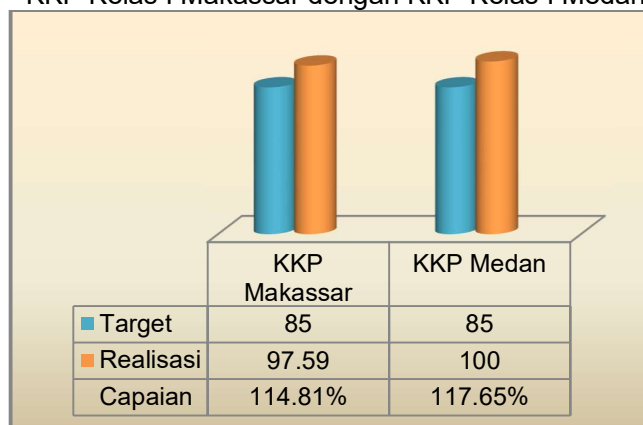
struktur tanah, unsur ataupun senyawa dalam tanah berpengaruh pada kualitas air baku sehingga dibutuhkan pengolahan sebelum air digunakan.

Grafik III.5 Perbandingan Capaian Indikator ke-3 KKP Kelas I Makassar tahun 2019 dengan tahun 2020



Grafik III.5 menggambarkan capaian indikator ke-3 KKP Kelas I Makassar. Untuk tahun 2020 di capaian kinerja indikator dia atas target yaitu sebesar 114,81%.

Grafik III.6 Perbandingan Capaian Indikator ke-3 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Dari Grafik III.6 menunjukkan capaian indikator untuk KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan berada di atas target yang telah ditentukan yaitu sebesar 114,81% dan 117,65%.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Seluruh rumpun jabatan yang ada di KKP Kelas I Makassar mengeluarkan rekomendasi untuk masing-masing kegiatan, karena didukung oleh sumber daya serta peran aktif lintas sector.
- 2) Keberhasilan program/indikator ini tidak terlepas dari peran internal KKP maupun peran aktif lintas sektor dan lintas program di pelabuhan, bandara, maupun di wilayah.
- 3) Kegiatan pengendalian vektor di pelabuhan dan bandara dalam rangka wilayah bebas vektor untuk menurunkan populasi vektor sehingga keberadaannya tidak beresiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah meliputi kegiatan pemberantasan tikus dan pinjal, pengamatan dan pemberantasan larva/jentik serta nyamuk dewasa, pengamatan dan pengendalian kecoa serta pengamatan dan pengendalian lalat.
- 4) Untuk pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja yang melebihi baku mutu indikator yang dipersyaratkan, maka dilakukan upaya pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis ataupun peraturan yang mengatur tentang upaya pengendalian vektor dan BPP untuk menekan jumlah ataupun indeks-indeks yang melebihi baku mutu sampai dengan memenuhi syarat. Sehingga upaya pengendalian dikategorikan sebagai keberhasilan pelaksanaan program untuk mendukung indikator penilaian kinerja.
- 5) Diklat pengendalian vektor dan BPP dengan fokus pelatihan mengenai nyamuk, lalat dan kecoa. Proporsi peserta diklat untuk KKP Kelas I Makassar diikuti oleh semua tenaga Entomolog kesehatan, dan perwakilan dari masing-masing wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Bagi wilayah kerja yang tidak memiliki tenaga Entomolog kesehatan/ Sanitarian maka diikuti oleh

petugas yang berprofesi sebagai Dokter/ Perawat/ Epidemiolog Kesehatan yang bertugas pada wilayah kerja tersebut.

- 6) Petugas Entomolog Kesehatan dan petugas pelaksana pengendalian vektor dan BPP ditugaskan untuk mengikuti pertemuan, seminar, kursus secara tatap muka dan virtual yang berhubungan dengan pengendalian vektor baik yang diselenggarakan oleh KKP, organisasi profesi, dan lembaga/ instansi lainnya.
- 7) Alokasi anggaran untuk mendukung keberhasilan indikator kinerja pada pagu anggaran tahun 2020 telah dialokasikan dana pada satuan biaya keluaran (SBK) 2020. Selain itu alokasi anggaran untuk kader pengendalian vektor dan BPP sangat membantu dalam pelaksanaan pengamatan dan pengendalian vektor sehingga capaian indikator kinerja bisa lebih dimaksimalkan.
- 8) Monitoring dan evaluasi dalam rangka uji efikasi/ resistensi bahan kimia yang digunakan telah dilaksanakan di wilayah kerja Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Palopo, Tampa Padang, Pasangkayu dan Pelabuhan Malili.
- 9) Pengawasan TTU dilakukan berupa inspeksi terhadap fisik bangunan dan pengukuran kualitas udara dalam ruang yang berpotensi terjadinya penularan penyakit. Pengawasan TTU dalam pelaksanaannya tergabung dalam pengawasan sanitasi gedung/ bangunan. Sarana TTU, seperti sarana ibadah dan terminal tidak terdapat pada seluruh wilker sehingga pengawasannya hanya dilakukan pada wilker tertentu.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Pengumpulan data tidak tepat waktu, sehingga menghambat analisa data
- 2) Pelaksanaan tugas kegiatan pengendalian vektor dan BPP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Teknis tertentu

- 3) Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengendalian vektor di wilayah kerja belum optimal.
 - 4) Perlu pengembangan/inovasi secara terus menerus mengenai metode pengendalian vektor.
 - 5) Perilaku masyarakat yang tidak menjaga kebersihan dan tempat penampungan air agar terbebas dari akses nyamuk *Aedes aegypti* meletakkan telurnya.
 - 6) Ketersediaan alat pendukung berupa alat ukur kualitas lingkungan belum tersedia dengan SDM yang terlatih.
 - 7) Penyediaan sarana sanitasi khususnya air bersih, limbah dan sampah.
 - 8) Penggunaan sarana TPM yang tidak sesuai dengan fungsinya di Pelabuhan Makassar.
 - 9) *Feedback* pihak TPM dari rekomendasi yang telah disampaikan kurang maksimal.
 - 10) Jumlah SDM sanitarian terlatih yang ada di wilayah kerja masih kurang.
 - 11) Peralatan pemeriksaan pendukung lapangan (*water test kit*) belum terdapat di seluruh wilker.
 - 12) Rujukan sampel sulit dilaksanakan karena merujuk ke laboratorium terakreditasi.
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Memudahkan system pelaporan dengan menggunakan media online dapat juga menggunakan website skdr.surveilans.org
 - 2) Penambahan tenaga entomolog kesehatan sehingga kebutuhan tenaga entomolog kesehatan bisa terpenuhi pada semua wilayah kerja.
 - 3) Peningkatan koordinasi dan advokasi ke lintas sektor dan lintas program mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor.
 - 4) Perlu dilakukan pendampingan terhadap wilayah kerja yang belum memiliki tenaga entomolog kesehatan untuk menunjang program pengendalian vektor dan BPP di wilayah kerja.

- 5) Keberlanjutan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi yang terkait Pelabuhan/ Bandara bebas vektor untuk meningkatkan wawasan kepada komunitas dan masyarakat pelabuhan dan bandara.
- 6) Pengendalian harus ditingkatkan baik dengan secara fisik, biologi, mekanik dan kimia.
- 7) Mengikutsertakan tenaga sanitarian pada kegiatan diklat/workshop dan lainnya.
- 8) Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat ukur kualitas lingkungan di seluruh wilker.
- 9) Koordinasi dengan PT. Pelindo IV Makassar sebagai pihak penyedia sarana di Wilayah Pelabuhan Makassar dengan beberapa fasilitas/ saran sanitasi yang belum memadai.
- 10) Koordinasi dengan pihak terkait dalam merumuskan kembali pengelolaan fungsi sarana yang sebelumnya tidak pada peruntukannya.
- 11) Penguatan regulasi dan pemberian sanksi yang tegas terhadap TPM yang tidak laik hygiene.
- 12) Penambahan jumlah SDM sanitasi terlatih di wilayah kerja.
- 13) Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pendukung (*water test kit*) di seluruh wilker
- 14) Rujukan sampel air minimal berkala dan jika dibutuhkan untuk penegakan hasil dari pemeriksaan lapangan serta menyediakan anggaran untuk rujukan sampel dari wilker.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

- 1) Sumber daya yang digunakan adalah memanfaatkan petugas surveilans puskesmas, maupun petugas surveilans KKP, sedangkan untuk wilker dengan jumlah personil yang terbatas ditunjuk petugas penanggung jawab PKSE.
- 2) Penggunaan anggaran dioptimalkan pada pembelian bahan dan kelengkapan pengendalian vektor dan BPP serta pengawasan sanitasi TTU dan TPM.

- 3) Petugas di wilker yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.
- 4) Ketersediaan SDM terlatih yang jumlahnya terbatas sehingga satu petugas melaksanakan lebih dari satu kegiatan. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang lainnya.

4. INDIKATOR KEEMPAT

Nilai Kinerja Anggaran

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga pada pasal 1 bahwa yang dimaksud kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek konteks adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L

termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Untuk penilaian indikator keempat tersebut, penilaian yang digunakan adalah penilaian pada aspek implementasi.

a. Pengertian

Persentase capaian kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai yang tertera pada *dashboard* aplikasi eMonev SMART DJA.

b. Definisi Operasional

Nilai kinerja anggaran merupakan Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik

c. Rumus (cara perhitungan)

Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan

$$NKI = \{P \times Wp\} + (K \times WK) + (CKP \text{ atau } CKK \times WcK) + (NE \times WE)$$

Keterangan :

NKI : Nilai kinerja atas aspek implementasi

P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

CKP : Capaian keluaran (output) program

CKK : Capaian keluaran (output) kegiatan

NE : Nilai efisiensi

Wp : Bobot penyerapan anggaran

WK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

WcK : Bobot capaian keluaran

WE : Bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:

$$Wp = 9,7\%$$

$$WK = 18,2\%$$

$$WcK = 43,5\%$$

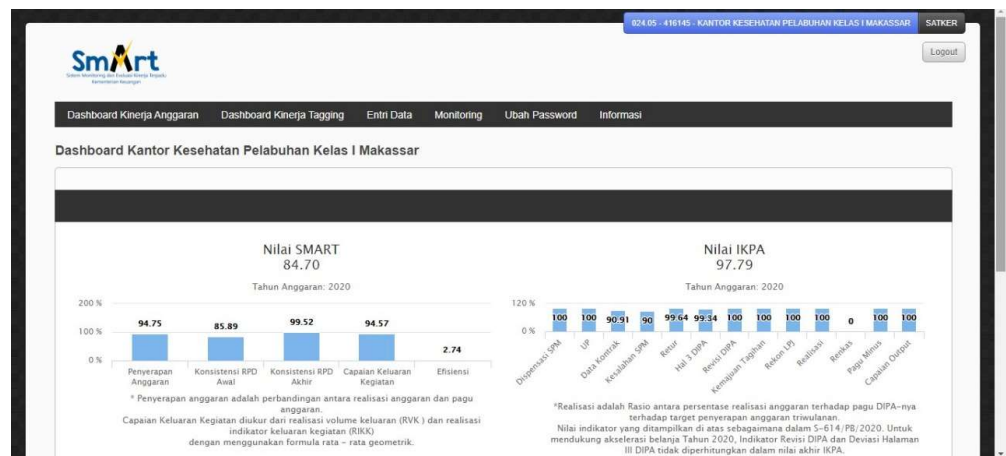
$$WE = 28,6\%$$

d. Capaian Kinerja

Sesuai dengan tampilan pada *dashboard* aplikasi eMonev SMART DJA capaian kinerja anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020 adalah 84,70. D

Capaian ini diperoleh dari capaian realisasi anggaran sebesar 94,75%, konsistensi dengan RPD Awal = 85,89%, konsistensi dengan RPD Akhir = 99,52%, capaian keluaran kegiatan = 94,57% dan efisiensi sebesar = 2,74%.

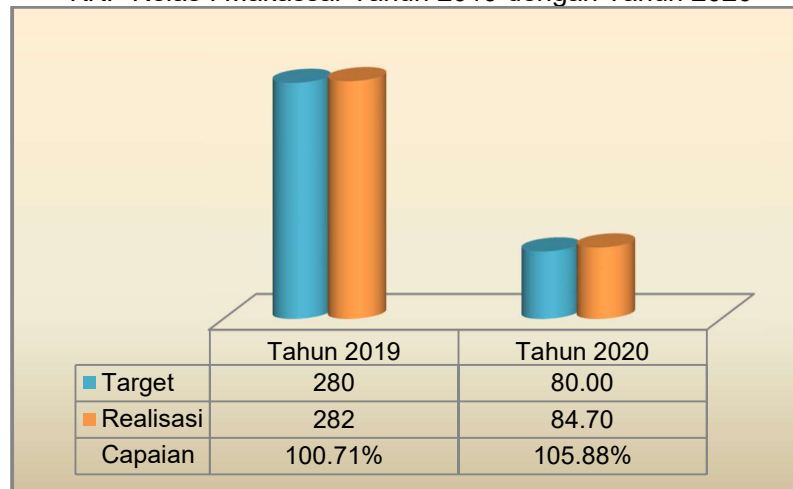
Capaian nilai SMART DJA KKP Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam Gambar III.1.



Gambar III.1 Screenshot Capaian Nilai SMART DJA KKP Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2020

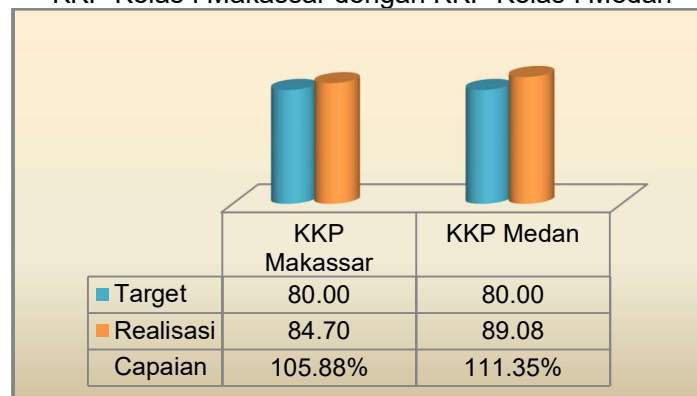
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, capaian kinerja tersebut termasuk kategori baik.

Grafik III.7 Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020



Dari grafik III.7 terlihat untuk capaian indikator untuk tahun 2019 dan 2020 berada di atas target yang telah ditentukan, namun indikator tersebut secara spesifik tidak sama, namun secara umum masih memiliki keterkaitan.

Grafik III.8 Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Dari Grafik III.8 terlihat capaian untuk indikator ke-4 KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan semuanya di atas target yang telah ditentukan.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi (*monev*) realisasi anggaran secara berkala. Monev realisasi anggaran dilakukan baik melalui pertemuan tatap muka maupun dengan menggunakan metode daring. Peserta rapat terdiri dari seluruh pejabat struktural, koordinator wilker, ULP, Pejabat pengadaan, pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan di masing-masing bidang.

Seluruh kegiatan yang ada dalam RKAKL dilakukan pembahasan capaian realisasinya serta kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai alternatif pemecahan masalah.

Hasil rapat sebelumnya akan dilakukan evaluasi pada pelaksanaan rapat berikutnya untuk memonitor rekomendasi yang dihasilkan apa telah dilaksanakan dengan baik.

- 2) Melakukan revisi kegiatan dan anggaran dalam RKAKL.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 di awal tahun. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar sumber daya diarahkan untuk pengawasan dan pelayanan Covid 19. Kegiatan ini membutuhkan dana yang pada RKAKL awal belum dianggarkan. Untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang tidak terencana sebelumnya, maka dilakukan revisi anggaran baik pada tingkat POK, revisi kanwil maupun revisi DJA.

Pada tahun 2020 revisi kegiatan dan anggaran dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali untuk semua tingkat kewenangan. Jenis revisi yang dilakukan adalah revisi dalam hal pagu tetap dan revisi dalam hal pagu berubah. Untuk revisi dalam hal pagu berubah, dilakukan untuk penurunan pagu PNBPN yang realisasinya tidak dapat mencapai target.

Revisi kegiatan dan anggaran yang paling besar adalah pada anggaran kegiatan pelayanan embarkasi dan debarkasi. Pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 ditiadakan sehingga semua anggarannya dilakukan *refocusing* ke pengawasan dan

pelayanan Covid 19 yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Di samping revisi terhadap kegiatan dan anggaran juga dilakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA. Hal ini dilakukan agar terjadi kesesuaian antara RPD dengan realisasi penarikan dana. Kesesuaian tersebut menjadi salah satu komponen penilaian evaluasi kinerja anggaran.

f. Masalah yang dihadapi

Belum pernah dilakukan pelatihan petugas yang menangani aplikasi e-Monev, baik e-Monev DJA maupun e-Monev Bappenas.

g. Usul pemecahan masalah

Melakukan peningkatan kapasitas petugas pengelola e-Monev melalui pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai yang salah satunya dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas petugas e-Monev baik dengan mengikuti pelatihan atau dengan melakukan konsultasi teknis.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan monev realisasi anggaran dan monev capaian keluaran yang dilakukan secara berkala dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan lainnya seperti rekonsiliasi data PNBPN dan pertemuan koordinasi internal. Dengan metode pelaksanaan kegiatan monev seperti ini maka akan terjadi efisiensi sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya.

5. INDIKATOR KELIMA

Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk

mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara. Salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah keandalan (*reliability*). Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 menyatakan bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (*suspen*) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Rekonsiliasi keuangan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-daerah menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web yang disebut e-Rekon&LK. Selain untuk rekonsiliasi, aplikasi e-Rekon&LK digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA-W, tingkat UAPPA-EI, dan tingkat UAPPA (K/L). Hal tersebut dimungkinkan dengan penerapan *single database* pada aplikasi e-Rekon&LK, sehingga satker cukup melakukan pengunggahan ADK dari aplikasi SAIBA ke aplikasi e-Rekon&LK, maka secara sistem akan dijalankan proses rekonsiliasi sekaligus proses penggabungan data laporan keuangan unit pelaporan di atasnya. Data laporan keuangan yang diunggah oleh satker merupakan data yang sama untuk menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W hingga tingkat UAPPA. Oleh karena itu, PA/KPA bertanggung jawab atas data yang ada pada aplikasi e-Rekon&LK.

Rekonsiliasi dimulai dengan mengunggah ADK SAIBA setelah melakukan rekon internal dengan pengelola SIMAK BMN ke aplikasi e-Rekon&LK yang dilakukan pada saat masa pengunggahan (*open period*). Proses rekonsiliasi sampai dengan terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dilaksanakan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Apabila tanggal 14 jatuh pada hari libur /yang diliburkan, rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Namun, dalam kondisi tertentu yang disebabkan antara lain :

- Kebijakan libur/cuti nasional;
- Kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan *unaudited*, dan tahunan *audited*;
- Permasalahan system.

a. Pengertian

Tingkat kepatuhan laporan keuangan adalah persentase penyampaian laporan keuangan setiap bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

b. Definisi Operasional

Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi

c. Rumus (cara perhitungan)

Penilaian persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dihitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang dinilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%

Kecuali untuk pelaporan bulan Januari–Mei terdapat kebijakan dari Kementerian Keuangan dilakukan *upload* di bulan Juni sesuai surat S-537/PB/2020 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020.

Akumulasi skor berdasarkan parameter dibagi dengan akumulasi parameter dalam setahun.

$$\text{Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LK Bulanan} = \frac{\sum \text{Total Skor Berdasarkan Parameter}}{\sum \text{Total Parameter}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Mengacu pada parameter skoring tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan bulanan Ditjen P2P TA 2020 dimana terdapat 5 (lima) indikator yakni:

1. Ketepatan waktu
2. Status rekonsiliasi
3. Hasil rekonsiliasi
4. Rekonsiliasi internal SAK dan SIMAK BMN
5. Jumlah *upload*

Tabel III.21 Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Parameter Rekonsiliasi LK Bulanan	Skoring	Skoring Tahun 2020													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Ketepatan Waktu Upload															
	Upload Pertama Sebelum Tanggal 14 Bulan Berikutnya (Open Periode)	100							100	100	100	100	100	100	100	100
	Upload Pertama Setelah Tanggal 14 Bulan Berikutnya	50														
	Belum Upload	0														
2	Status Rekonsiliasi															
	BAR Siap Download	100							100	100	100	100	100	100	100	100
	Menunggu TTD Kasi Vera	90														
	Menunggu TTD KPA	80														
	Analisa Hasil Rekon	70														
	Menunggu SATKER Upload Ulang	60														
	ADK Tidak Standar	50														
	Proses Sistem	30														
	Belum Upload	0														
3	Hasil Rekonsiliasi															
	Sudah Sama dan Tidak Terdapat TDK	100							100	100	100	100	100	100	100	100
	Masih Terdapat TDK	50														
	Belum Upload	0														
4	Rekonsiliasi Internal SAK >< SIMAK-BMN															
	Tidak Ada Perbedaan	100							100	100	100	100	100	100	100	100
	Masih Terdapat Perbedaan	50														
	Belum Upload	0														
5	Jumlah Upload															
	Di bawah dan sama dengan 5 Kali Upload	100							100	100	100	100	100	100		
	Di atas 5 Kali Upload	50														50
	Belum Upload	0														
Jumlah Skoring									500	500	500	500	500	500	500	450
Proporsitas Tingkat Kepatuhan Penyampaian LK Bulanan									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
Rata-rata Proporsitas Tingkat Kepatuhan Penyampaian LK Bulanan (Toleransi Bulan Januari - Mei) (Bulan Desember Rekon Belum Selesai) = (Jumlah Proporsitas 7 Bulan / 7)										98.57						
Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan dengan target 80 %										123.21						

Dari tabel III.21 dapat disimpulkan Realisasi Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada bulan Juni hingga Desember (saat penulisan Laporan Kinerja) adalah 98,57%, dengan capaian sebesar 123,21%. Hal ini dapat kita lihat pada *screenshot* aplikasi e-Rekon bulan Juni hingga Desember 2020.

No	BAESI	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	3	2020-07-07 09:20:19	2020-07-11 15:51:47	2020-07-07 09:20:19	28198
2	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	6	2020-07-10 09:42:45	2020-07-19 10:57:00	2020-07-10 09:42:45	36193

Gambar III.2 Screenshot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Juni Tahun Anggaran 2020

Dari gambar III.2 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan Juni 2020 dengan jumlah upload sebanyak 3 kali (dibawah 5), sehingga memperoleh skoring 100 dalam rekonsiliasi LK.

No	BAESI	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Gagal (SADK Tidak Ada)	Terkonfirmasi (Caput)	1	2020-08-25 09:46:09	2020-08-25 09:46:09	2020-08-25 09:46:09	52769
2	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	2	2020-08-25 11:35:28	2020-08-26 08:42:34	2020-08-25 11:35:28	53825

Gambar III.3 Screenshot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Juli Tahun Anggaran 2020

Dari gambar III.3 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan Juli 2020 dengan jumlah upload sebanyak 2 kali (dibawah 5), sehingga memperoleh skoring 100 dalam rekonsiliasi LK.

No	BAESI	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Siap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	4	2020-09-04 19:44:21	2020-09-11 08:05:28	2020-09-04 19:44:21	69547
2	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Siap Download	Upload Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)	Terkonfirmasi (Caput)	2	2020-09-09 13:27:59	2020-09-10 08:56:45	2020-09-09 13:27:59	77596

Gambar III.4 Screenshot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020

Dari gambar III.4 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan Agustus 2020 dengan jumlah upload sebanyak 4 kali (dibawah 5), sehingga memperoleh skoring 100 dalam rekonsiliasi LK.

No	BAESI	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Siap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	5	2020-10-07 08:42:47	2020-10-10 20:06:04	2020-10-07 08:42:47	93415
2	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Siap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	5	2020-10-06 20:54:57	2020-10-19 13:27:40	2020-10-06 20:54:57	92956

Gambar III.5 Screenshot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan September Tahun Anggaran 2020

Dari gambar III.5 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan September 2020 dengan jumlah upload sebanyak 5 kali (sama dengan 5), sehingga memperoleh skoring 100 dalam rekonsiliasi LK.

No	BAES1	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	3	2020-11-13 15:12:58	2020-11-18 14:13:19	2020-11-13 15:12:59	110153
2	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)	Terkonfirmasi (Caput)	5	2020-11-16 16:49:02	2020-11-19 10:29:32	2020-11-16 16:49:02	114816

Gambar III.6 Screenshoot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020

Dari gambar III.6 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan Oktober 2020 dengan jumlah upload sebanyak 3 kali (di bawah 5), sehingga memperoleh skoring 100 dalam rekonsiliasi LK.

No	BAES1	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAI	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)	Terkonfirmasi (Caput)	8	2020-12-03 14:27:47	2020-12-17 15:26:43	2020-12-03 14:27:47	126339
2	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	3	2020-12-02 13:34:48	2020-12-08 17:56:37	2020-12-02 13:34:48	123930

Gambar III.7 Screenshoot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan November Tahun Anggaran 2020

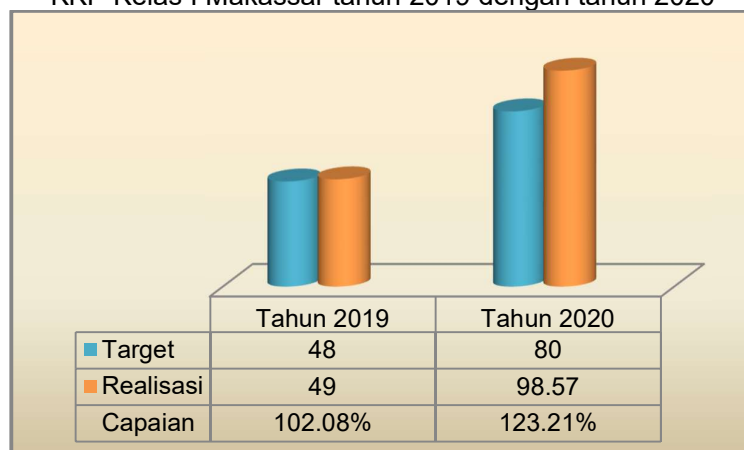
Dari gambar III.7 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan November 2020 dengan jumlah upload sebanyak 3 kali (di bawah 5), sehingga memperoleh skoring 100 dalam rekonsiliasi LK.

No	DAESI	KDSATKER	NMSATKER	STATUS SAJ	STATUS BMN	STATUS Capaian Output	upload ke	first upload	last upload	tanggal bar	no bar
1	02405	613132	BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	11	2021-01-06 11:49:29	2021-02-22 11:23:21	2021-01-06 11:49:29	143390
2	02405	416145	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR	BAR Slap Download	Upload Data SIMAK BMN Berhasil	Terkonfirmasi (Caput)	9	2021-01-12 08:35:00	2021-02-05 09:06:04	2021-01-12 08:05:00	154648

Gambar III.8 Screenshoot Monitoring Rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar Bulan Desember Tahun Anggaran 2020

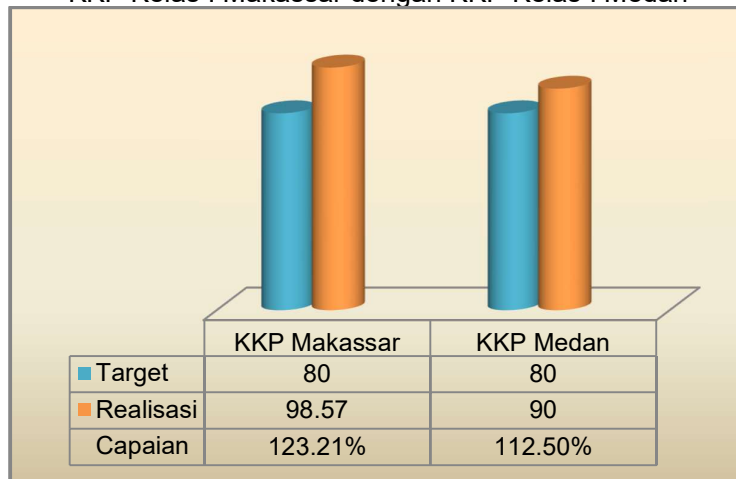
Dari gambar III.8 terlihat monitoring rekonsiliasi KKP Kelas I Makassar di Bulan Desember 2020 dengan jumlah upload sebanyak 9 kali (di atas 5), sehingga memperoleh skoring 50 dalam rekonsiliasi LK.

Grafik III.9 Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar tahun 2019 dengan tahun 2020



Grafik III.9 terlihat bahwa tahun 2019 dan 2020 capaian indikator ke-5 melebihi target yang telah ditentukan. Namun indikator untuk tahun 2020 sangat spesifik terhadap kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan, sehingga pencapaiannya jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Grafik III.10 Perbandingan Capaian Indikator Ke-5 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Grafik III.10 menggambarkan bahwa untuk KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan mempunyai capaian kinerja indikator di atas target yang ditentukan yaitu sebesar 123,21% dan 112,50%.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Menyiapkan data dukung yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi sebelum open period dan melakukan rekon internal dengan pengelola SIMAK BMN, untuk selanjutnya menelaah penerimaan negara, belanja satker, dan pagu melalui aplikasi SAIBA.
- 2) Melakukan koreksi dan berkoordinasi langsung dengan penanggung jawab data yang dibutuhkan selama masa *open period* apabila masih terdapat selisih berdasarkan laporan e-Rekon untuk selanjutnya melakukan *upload* perbaikan ke aplikasi e-Rekon.

f. Masalah yang dihadapi

1) Internal

Masih kurangnya pemahaman petugas mengenai akuntansi akrual, aplikasi SAIBA dan aplikasi pendukung lainnya sehingga menyulitkan dalam analisis permasalahan rekonsiliasi laporan keuangan.

2) Eksternal

a) *Update* aplikasi ditengah *open period* mengakibatkan harus dilakukan rekon berulang.

b) Terlambatnya dokumen pendukung dari satker pengirim terkait Transfer Masuk/Keluar BMN/Persediaan

g. Usul pemecahan masalah

1) Internal

Penguatan kapasitas petugas mengenai Akuntansi Akrual, Aplikasi SAIBA dan Aplikasi pendukung lainnya

2) Eksternal

a) Kesesuaian antara *update* aplikasi dengan *open period*.

b) Ketepatan waktu penerimaan barang dengan dokumen pendukung terkait transfer masuk/keluar BMN/Persediaan

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan penanggung jawab aplikasi lainnya sebelum *open period* untuk memastikan kesesuaian data SAI dan SIAP dapat mengefisienkan waktu, jumlah *upload* dan sumber daya.

6. INDIKATOR KEENAM

Kinerja Implementasi WBK Satker

Target nilai WBK untuk KKP Kelas I Makassar tahun 2020 sebesar 70.

a. Pengertian

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

b. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

c. Rumus (cara perhitungan)

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

Akumulasi penilaian :

A. Proses (60)

I. Manajemen Perubahan	nilai	8
II. Penataan Tatalaksana	nilai	7
III. Penataan Sistem Manajemen SDM	nilai	10
IV. Penguatan Akuntabilitas	nilai	10
V. Penguatan Pengawasan	nilai	15
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	nilai	10

B. Hasil (40)

I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	nilai	20
II. Kualitas Pelayanan Publik	nilai	20

d. Capaian Kinerja

Untuk capaian kinerja indikator kinerja implementasi WBK KKP Kelas I Makassar penjabarannya dapat dilihat dalam tabel III.21

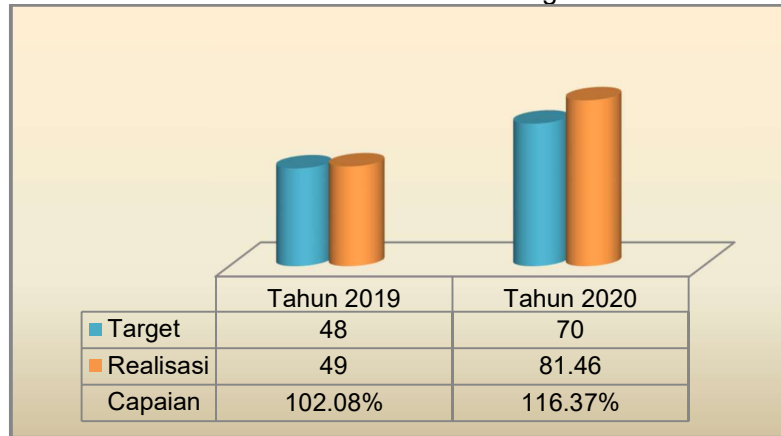
Tabel III.22 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Implementasi WBK KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

Penilaian		Target	Realisasi	Capaian
		70	81.46	116.37%
A. Proses (60)	I. Manajemen Perubahan		6.12	
		1. Tim Kerja	1	
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI)	1.25	
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1.11	
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	2.75	
	II. Penataan Tatalaksana		5.45	
		1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1.45	
		2. e-Office	3	
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1	
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM		6.38	
		1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	0.45	
		2. Pola mutasi internal	0.83	
		3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1.6	
		4. Penetapan kinerja individu	2.25	
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/perilaku pegawai	1.01	
		6. Sistem informasi kepegawaian	0.25	
	IV. Penguatan Akuntabilitas		9.24	
		1. Keterlibatan pimpinan	4.45	
		2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	4.79	
	V. Penguatan Pengawasan		9.94	
		1. Pengendalian gratifikasi	2.51	
		2. Penerapan SPIP	1.88	
		3. Pengaduan masyarakat	1.88	
4. Whistle Blowing System		1.88		
5. Penanganan benturan kepentingan		1.81		

	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		8.21		
		1. Standar Pelayanan	1.88		
		2. Budaya pelayanan prima	3.34		
		3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	3		
B. Hasil (40)	I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN		18.98		
		1. Nilai survey persepsi korupsi (survey eksternal)	13.98		
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	5		
	II. Kualitas Pelayanan Publik		17.15		
		1. Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal)	17.15		
Capaian Indikator Ke-6			70	81.46	116.37%

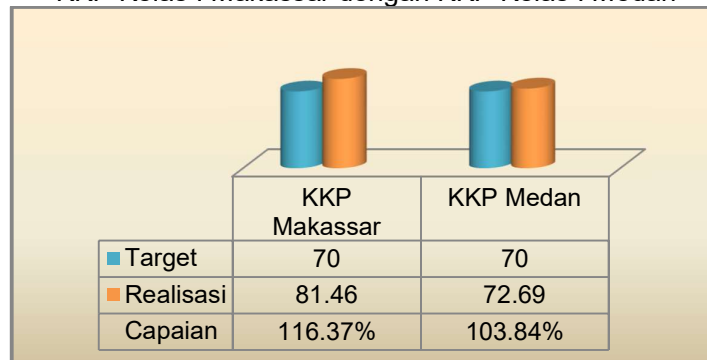
Dari tabel III.22 menunjukkan nilai capaian kinerja implementasi WBK KKP Kelas I Makassar sebesar 81,46. Hasil ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan yang dilakukan pada tanggal 1 sd 2 Oktober 2020. Dari total nilai pengungkit dan nilai hasil menunjukkan bahwa nilai 81,46 tersebut adalah hasil pleno dari TPI dan sudah memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat WBK sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6590/2020 tentang Penetapan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Yang Telah Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas Drai Korupsi Tahun 2020 dan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkes Yang Mengalami Peningkatan Dalam Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-Turut.

Grafik III.11 Perbandingan Capaian Indikator Ke-6 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020



Grafik III.11 menggambar bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 capaian indikator mencapai di atas target yang telah ditentukan, namun untuk tahun 2019 implementasi WBK tidak secara khusus dijadikan sebagai indikator, namun terkandung didalam indikator dokumen dukungan manajemen dan teknis lainnya. Untuk tahun 2020 implementasi WBK dijadikan sebagai salah satu indikator capaian kinerja, KKP Kelas I Makassar dengan melalui berbagai tahap mulai dari pendampingan, pengawasan, *self assessment*, *pre assessment* sampai ke tahap Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI berhasil meraih predikat menuju WBK satker dengan nilai 81,46 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6590/2020. Dari nilai tersebut melampaui target indikator yang ditetapkan.

Grafik III.12 Perbandingan Capaian Indikator Ke-6 KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Dari grafik III.12 KKP Kelas I Makassar dan KKP Kelas I Medan telah mencapai di atas target yang telah ditentukan. Namun mengacu pada regulasi Peraturan Menteri PAN-RB No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, KKP Kelas I Makassar berhasil meraih predikat menuju WBK dengan nilai 81,46, dimana standar nilai menuju predikat WBK sebesar 75.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Kontribusi masing-masing kelompok kerja yang telah ditetapkan di dalam SK Kepala Kantor tentang Pembangunan Zona Integritas;
- 2) Keikutsertaan seluruh pegawai, baik itu ASN maupun PPNP dalam mewujudkan pembangunan zona integritas;
- 3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga pembangunan zona integritas dapat berjalan secara berkesinambungan;
- 4) Pendampingan dari Tim Itjen Kemenkes berupa *pre assesement* yang dilakukan secara periodik;
- 5) Dukungan lintas sektor yang sangat antusias dalam mewujudkan zona integritas;
- 6) Pembangunan Zona Integritas wilayah pelabuhan dan bandara yang menjadikan motivasi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas di KKP Kelas I Makassar.

f. Masalah yang dihadapi

- 1) Pengembangan inovasi dengan menggunakan sistem IT yang membutuhkan anggaran khusus dalam pengembangan tersebut;
- 2) SOP sebagai regulasi dalam pelaksanaan kegiatan kadang tidak *update* sesuai dengan kondisi saat ini;
- 3) Regulasi dari lintas sektor yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KKP Kelas I Makassar yang kadang berubah tanpa adanya sosialisasi kepada pengguna jasa;

- 4) Pola pikir masing-masing pegawai yang ada di KKP Kelas I Makassar yang berbeda-beda.

g. Usul pemecahan masalah

- 1) Perlu dianggarkan terkait pengembangan inovasi dalam mendukung sistem operasional perkantoran serta mendukung pelayanan kepada pengguna jasa KKP Kelas I Makassar;
- 2) Perlu adanya *money* secara berkala terhadap SOP yang telah ditetapkan, sehingga SOP yang berjalan sesuai dengan kondisi saat ini;
- 3) Perlu adanya komitmen dan sosialisasi terhadap regulasi yang diterbitkan, sehingga tidak ada benturan terhadap pengguna jasa;
- 4) Perlu adanya pendekatan, pengawasan serta *coaching* secara berkala terhadap pola pikir dalam memberi layanan kepada pengguna jasa.

h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adanya pengembangan inovasi aplikasi SIMPELTA yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan dari KKP Kelas I Makassar.

7. INDIKATOR KETUJUH

Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN dalam peningkatan kapasitasnya. Untuk tahun 2020 target untuk peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%.

a. Pengertian

Persentase jumlah pegawai KKP Kelas I Makassar yang ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensinya sebanyak 20 JPL {seminar, workshop, capacity building, on job training} dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

b. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional

c. Rumus (cara perhitungan)

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%

$$\frac{\text{Jumlah peningkatan kapasitas pegawai sebanyak 20 JPL}}{\text{Target Jumlah Pegawai sebanyak 20 JPL}} \times 100\%$$

d. Capaian Kinerja

$$\frac{51,13}{45} \times 100\% = 113,62$$

Tabel III.23 Perbandingan Target dan Capaian Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Target RAP	Target RAK	Realisasi	Capaian (%)
1	dr. MARSELINA SILI PAPU, MPH		45%	(68/133)	113,62
2	HJ. NURWA HALIM, SST, S.Kep				
3	dr. RIDHA ILAHI				
4	dr. WAHJU VIVA IRIANAWATI				
5	dr. MUH. HASKAR HASAN, M.Kes				
6	Dra. AISYAH SUFRIE, MSc. PH				
7	HASTAWAVIA, SKM				
8	H. ANDI ALI RESA, SKM, M.Kes				
9	EGO, SKM, M.Kes				

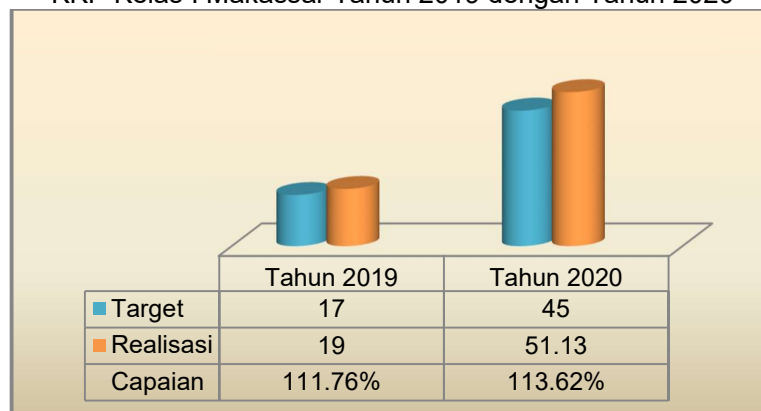
10	drg. ARIFA SETIANI THAMRIN, M.Kes				
11	dr. HJ. TRI HANDAYANI NAIM				
12	NIRWAN, SKM, M.Kes				
13	dr. HJ. RINI ASTUTY				
14	SITTI RAHMATIA, SKM				
15	YUSFANDIAR				
16	dr. NURLAILAH MUHYIDDIN				
17	dr. H. ABBAS ZAVEY NURDIN , Sp.Ok, MKK				
18	ABD. GANI BUATAN, SKM				
19	ARNI ANGRANY AMIR, ST				
20	H. TUBIANTO ANANG ZULFIKAR, SKM, M.Epid				
21	IBRAHIM, SKM, M.Kes				
22	HJ. ZAINAB, AMK				
23	HJ. SATRIANI, SKM				
24	SYAHRIANTI SAID, S.ST				
25	ABDUL RAHMAN MUSTAFA, SKM				
26	H. NUR KAMAR, SKM, M.Kes				
27	HJ. NUR MAGFIRAH, SKM, M.Kes				
28	HJ. SITTI HAMDIA, SKM, M.Kes				
29	dr. RUSLAN				
30	dr. HJ. SRI APRIANITA				
31	dr. HJ JUMARNI				
32	dr. NAJRIAH NASIR				
33	dr. ANDI IRFAN LATIF				
34	HJ. DELIA ROSIDAH, SKM, M.Kes				
35	RIZAL, SKM				
36	H. ABD. RAUF, AMK				
37	HJ. MASRIANI, S.Kep, Ns				
38	H. RAJIMAN, AMd.KL				
39	KARYADI EKA PUTRA, SKM				
40	NURDIANSAH SAHRIR, SKM				
41	H. RIDWAN, SKM				
42	NINING AYU PURNAMA, S.Kom				
43	HJ. NURHAYATI M, SKM				
44	ARFIANI, SKM				
45	HJ. DIANA ABDULLAH, S.Kep, Ns				
46	NURHAYATI HL, SKM				
47	YURIS ARTHA ROMBE ADA, S.K.M				
48	H. WAHYUDI HIDAYAT, S.Kep, Ners				
49	HILDA ADRIATI MALIK, AMd.KL				
50	H. CHANDRA WAHYUDDIN, AMK				
51	DIAN PURNITA, SKM				
52	UMMU KALSUM UKKAS, SKM				
53	MARIA VERONIKA AMBABUNGA, SKM				
54	AMRIANA AMIN, AMd.Ak				
55	RINA VIRGIANA THAMRIN, S.Tr.KL				
56	RISKA, AMAK				
57	ANUGRAYANTI, S.Tr.KL				
58	KAIMUDDIN, AMd.KL				
59	DESI MARLINA, A.Md.KL				
60	HARINA, A.Md.KL				
61	LUKAS TANDI PAYUNG				
62	SYAMSURI, AMd. Kep				

63	RISMA TANGNGA GULING, AMK				
64	FATIMAHSARI, AMd.AK				
65	ILHAM, AMK				
66	ZULVITA AYSAH, AMd.KL				
67	ASTRI EKA WARDANI, AMd.Kep				
68	FATHUL JANNAH, AMd.Kep				
Capaian Indikator 7			45%	51,13%	113,62

Dari tabel III.23 realisasi peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi dengan jumlah total seluruh ASN yang ada di KKP Kelas I Makassar, sehingga diperoleh 51,13%.

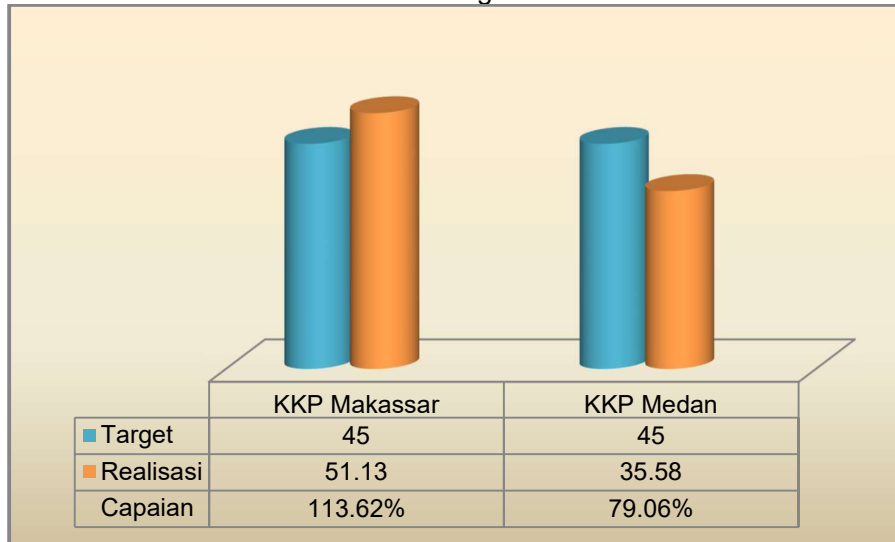
Target yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2020 Revisi Desember sebesar 45%, sehingga capaian dari peningkatan ASN sebanyak 20 JPL sebesar 113,62%.

Grafik III.13 Perbandingan Capaian Indikator Ke-7 KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020



Dari grafik III.13 terlihat bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 capaian untuk indikator tercapai di atas target yang telah ditentukan. Namun untuk indikator di tahun 2019 berdasarkan jenis peningkatan kapasitas ASN yang diikuti, sedangkan untuk tahun 2020 peningkatan kapasitas ASN berdasarkan jumlah 20 JPL yang telah diikuti.

Grafik III.14 Perbandingan Capaian Indikator Ke-7
KKP Kelas I Makassar dengan KKP Kelas I Medan



Berdasarkan Grafik III.14 terlihat bahwa KKP Kelas I Makassar mencapai di atas target, karena didukung oleh peningkatan ASN dengan sistem daring karena Pandemi Covid 19. Dimana pelaksanaan peningkatan kapasitas lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu dan anggaran.

e. Analisis Keberhasilan Kegiatan

- 1) Dimasa pandemi Covid 19 mengakibatkan hampir seluruh kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan secara daring, sehingga semakin memudahkan ASN untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ASN tersebut tanpa mengeluarkan anggaran yang besar;
- 2) Informasi yang diperoleh terkait peningkatan kapasitas sangat mudah didapatkan, baik melalui undangan secara *online*, via email kantor, WA grup sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN;

- 3) Peningkatan kapasitas ASN dalam bentuk Webinar juga banyak dilakukan untuk mengupdate kompetensi ASN Bidang Kesehatan dalam penanganan Pandemi Covid 19.
- f. Masalah yang dihadapi
- 1) Peningkatan kapasitas ASN via *online* mempunyai kelemahan karena peserta Webinar yang cukup banyak, dengan keterbatasan jaringan sehingga kadang materi yang disampaikan kurang maksimal dipahami oleh peserta Webinar;
 - 2) Untuk kegiatan peningkatan kapasitas secara *offline* atau tatap muka sangat minim diikuti karena kurangnya penyelenggara.
- g. Usul pemecahan masalah
- 1) Peningkatan kapasitas ASN semaksimal mungkin diikuti sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN;
 - 2) Usulan peningkatan kapasitas ASN masing-masing Bidang dan Bagian harus dibuat secara berkala, sehingga peningkatan kapasitas dapat merata untuk setiap ASN.
 - 3) Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas ASN terkait kompetensi jabatan masing-masing ASN.
- h. Analisis Efisiensi Sumber Daya
- 1) Penggunaan anggaran peningkatan kapasitas lebih kecil dibanding tahun 2019, karena dilakukan secara daring. Anggaran lebih dioptimalkan pada penanggulangan Pandemi Covid 19.

B. Realisasi Anggaran

1. Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam tabel III.24 di bawah ini.

Tabel III.24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Rupiah Murni (RM)	23.724.068.000	22.614.211.631	
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4.273.422.000	3.925.903.340	
	Total	27.997.490.000	26.540.114.971	94,79

2. Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel III.25 di bawah ini.

Tabel III.25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	17.161.386.000	16.457.675.901	95,90
2	Belanja Barang	10.836.104.000	10.069.916.520	92,93
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	27.997.490.000	26.527.592.421	94,75

3. Berdasarkan Kegiatan, Output dan Sub Output

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan, output dan sub output dapat dilihat dalam tabel III.26

Tabel III.26 Realisasi Anggaran berdasarkan Output dan Sub Output Kegiatan
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kode	Output	Sub Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2063.970	Layanan dukungan manajemen satker		1.658.830.000	1.527.018.370	92,05
2	2063.994	Layanan Perkantoran		21.655.624.000	20.706.357.667	95,62
3	4249.001.001	Layanan pengendalian faktor risiko	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	474.821.000	406.084.277	85,52
4	4249.001.002	penyakit yang dikebdalikan di Pintu Masuk	Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB	132.460.000	114.931.200	86,77

5	4249.001.003	Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM	361.933.000	344.979.200	95,32
6	4249.001.004	Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang	2.440.617.000	2.292.422.163	93,93
7	4249.001.U01	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	2.460.000	2.400.000	97,56
8	4249.001.U02	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	5.000.000	4.972.000	99,44
9	4249.001.U04	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	438.000.000	437.979.000	100
10	4249.001.U07	Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	3.000.000	600.000	20
11	4249.001.U08	Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	1.000.000	0	0
12	4249.001.U10	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	50.925.000	30.740.000	60,36
13	4249.001.U14	Layanan pengendalian vektor DBD	63.660.000	61.406.544	96,46
14	4249.001.U15	Layanan Survei Vektor PES	301.041.000	274.939.500	91,33
15	4249.001.U16	Layanan Pengendalian Vektor Diare	22.516.000	13.182.000	58,55
16	4249.001.U18	Layanan Survei Vektor DBD	199.680.000	151.792.050	76,02
17	4249.001.U19	Layanan Survei Vektor Malaria	43.498.000	36.738.000	84,46
18	4249.001.U20	Layanan Survei Vektor Diare	33.280.000	29.705.000	89,26
19	4249.001.U21	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	45.375.000	42.433.000	93,52
20	4249.001.U22	Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP	63.770.000	61.435.000	96,34
	Total		27.997.490.000	26.540.114.971	94,79

4. Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar
a. Realisasi Anggaran Indikator Pertama

Tabel III.27 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Pertama Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengawasan sanitasi bangunan/gedung/perkan toran/industri/TTU/TPM	26.700.000	20.396.900	76,39
2	Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan	182.550.000	177.329.400	97,14
3	Self Assesment / Penilaian Pelabuhan Sehat	11.392.000	7.226.200	63,43
4	Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional	12.720.000	12.588.400	98,97
5	Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis	44.240.000	42.440.000	95,93
6	Pelaksanaan Pra Embarkasi	1.650.000	1.650.000	100
7	Pengawasan faktor risiko dalam rangka arus mudik	2.700.000	1.350.000	50
8	Layanan Kesehatan pada situasi khusus (SBK)	200.000	0	0
9	Refreshing petugas TGC	73.050.000	62.108.000	85,02
10	Layanan Pengawasan Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang	899.990.000	868.655.700	96,52
11	Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut	19.744.000	19.687.500	99,71
12	Pemeriksaan Faktor risiko kesehatan penjamah makanan di Kapal Penumpang	3.400.000	1.400.000	41,18
13	Pembekalan Tenaga Bantuan Pengawasan Pelaku Perjalanan dalam rangka penanganan Covid 19	9.940.000	9.840.000	98,99
14	Penyediaan Bahan Kesehatan	237.485.000	233.727.585	98,42
15	Penyediaan Bahan Pemeriksaan Habis Pakai	7.500.000	7.500.000	100

16	Distribusi Vaksin/Obat/Perbekkes Pelayanan Kesehatan	24.800.000	8.663.400	34,93
17	Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja	57.920.000	56.315.600	97,23
18	Deteksi dini penyakit TB di Pelabuhan / Bandara	46.875.000	44.962.767	95,92
19	koordinasi, integrasi, sinkronisasi program Kekarantinaan Kesehatan	87.760.000	67.665.400	77,10
20	Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, termasuk Malaria Cross Border	40.640.000	37.019.600	91,09
21	Pelaksanaan/Koordinasi/ Konsolidasi/Konsultasi penanganan Covid 19	537.510.000	493.608.799	91,83
22	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	2.460.000	2.400.000	97,56
23	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	5.000.000	4.972.000	99,44
24	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	438.000.000	437.979.000	100
25	Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	3.000.000	600.000	20
26	Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	1.000.000	0	0
27	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	50.925.000	30.740.000	60,36
28	Biaya alat habis pakai Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	45.375.000	42.433.000	93,52
29	Blaya alat habis pakai Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP	63.770.000	61.435.000	96,34
	Total	2.938.296.000	2.754.694.251	93,75

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 2.754.694.251,- (93,75 %).

b. Realisasi Anggaran Indikator Kedua

Tabel III.28 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kedua
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pertemuan evaluasi forum pelabuhan sehat	24.231.000	16.070.100	66,32
2	Penguatan sistim layanan rujukan Rumah Sakit	2.220.000	2.148.000	96,76
3	Tindakan Penyehatan Lingkungan/Alat Angkut	16.740.000	16.328.400	97,54
4	Pemusnahan Limbah Medis	20.525.000	20.421.500	99,50
5	Evaluasi Hasil Deteksi Dini HIV-AIDS	4.250.000	0	0
6	Evaluasi program TB	4.500.000	0	0
7	Verifikasi dan pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional	16.110.000	10.858.400	67,40
8	Penanganan Karantina/ isolasi mandiri Covid 19	26.288.000	24.511.862	93,24
9	Pemeriksaan Rapid/Swab/Rujukan sampel Covid 19	38.870.000	34.026.200	87,54
	Total	153.734.000	124.364.462	80,90

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 124.364.462,- (80,90 %).

c. Realisasi Anggaran Indikator Ketiga

Tabel III.29 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketiga Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Formulir Pendukung Penerbitan Dokumen Kekegiatan Kesehatan	6.634.000	6.634.000	0
2	Monev Resistensi / Efikasi Insektisida	90.280.000	83.791.800	92,81
3	Bahan dan kelengkapan pengendalian vektor	33.000.000	31.970.000	96,88
4	Pertemuan koordinasi/konsultasi pengendalian faktor risiko lingkungan	16.402.000	10.911.400	66,52
5	Pemberdayaan Saka Bakti Husada	6.960.000	6.866.000	98,65
6	Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB / Penyelidikan Epidemiologi	51.990.000	38.426.400	73,91
7	Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilker Pelabuhan Belang-Belang Pos Pel. Pasangkayu	151.883.000	151.771.200	99,93
8	Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Table Top Exercise di Wilker Awerange	71.290.000	65.920.000	92,47
9	Table Top Exercise di Pelabuhan Makassar	65.710.000	65.180.000	99,19
10	Community Base Surveilans	6.164.000	5.880.000	95,39
11	Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko	285.320.000	283.613.750	99,40
12	Fooging Layanan pengendalian vektor DBD	63.660.000	61.406.544	96,46
13	Pemetaan Layanan Survei Vektor PES	6.201.000	1.910.000	30,80
14	Persiapan bahan dan alat Layanan Survei Vektor PES	78.039.000	74.196.000	95,08
15	Pemasangan perangkat Layanan Survei Vektor PES	214.461.000	197.850.000	92,25
16	Identifikasi tikus dan pinjal Layanan Survei Vektor PES	2.340.000	983.500	42,03
17	Spraying Layanan Pengendalian Vektor Diare	22.516.000	13.182.000	58,55
18	Survei dan larvasida Layanan Survei Vektor DBD	199.680.000	151.792.050	76,02
19	Survei jentik Layanan Survei Vektor Malaria	1.378.000	520.000	37,74
20	Survei nyamuk Layanan Survei Vektor Malaria	42.120.000	36.218.000	85,99

21	Survei Vektor Diare Layanan Survei Vektor Diare	33.280.000	29.705.000	89,26
Total		1.449.308.000	1.312.093.644	90,53

d. Realisasi Anggaran Indikator Keempat

Tabel III.30 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keempat
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyusunan E-Planning	8.022.000	7.963.800	99,27
2	Penyusunan RKA-K/L	64.890.000	59.169.328	91,18
3	Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNBP	13.970.000	12.987.200	92,96
4	Pertemuan/konsultasi Laporan Emonev	14.980.000	12.987.200	86,70
5	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	74.330.000	61.703.400	83,01
Total		176.192.000	154.810.928	87,86

Anggaran jumlah pelayanan kesehata pada situasi khusus adalah sebesar Rp. 1.330.634.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.322.268.590,- atau 99,37 %.

e. Realisasi Anggaran Indikator Kelima

Tabel III.31 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Kelima
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	29.520.000	29.518.000	99,99
2	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahun 2019 dan Semester I TA 2020 (U)	40.370.000	39.990.700	99,06
3	Rekonsiliasi Pengelolaan PNBP (U)	299.340.000	294.726.000	98,46

4	Koordinasi Pengelolaan PNBP	10.560.000	10.180.400	96,41
5	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U)	34.580.000	33.142.800	95,84
6	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.161.386.000	16.470.198.451	95,97
Total		17.575.756.000	16.877.756.951	96,03

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 171.339.000,- (97,94 %).

f. Realisasi Anggaran Indikator Keenam

Tabel III.32 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Keenam Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyusunan laporan pelaksanaan program (U)	431.710.000	400.849.200	92,85
2	Penyusunan Laporan Tahunan satker (U)	3.150.000	3.150.000	100
3	Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja (U)	13.800.000	13.800.000	100
4	Penyusunan profil dan media KIE (P)	24.300.000	24.300.000	100
5	Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (U)	16.000.000	7.398.000	46,24
6	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai (U)	8.000.000	4.771.800	59,65
7	Layanan Mutasi Kepegawaian (U)	31.432.000	28.153.200	89,57
8	Pelayanan Hukum	24.300.000	18.019.200	74,15
9	Pengelolaan Rumah Tangga	66.096.000	61.692.000	93,34
10	Layanan Humas	27.640.000	23.480.600	84,95
11	Layanan Organisasi Tatalaksana	266.690.000	244.123.662	91,54
12	Pengelolaan BMN	55.580.000	52.986.485	95,33
13	Kalibrasi Alat Kesehatan	900.000	0	0
14	Desiminasi Informasi melalui media KIE	21.750.000	19.768.000	90,89
15	Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	273.000.000	238.671.820	87,43
16	Pengadaan pakaian dinas dan Kelengkapan seragam	231.930.000	226.898.000	97,83

17	Pengadaan pakaian kerja dokter/satpam/sopir/tenaga lainnya	39.872.000	34.901.900	87,53
18	Pemeliharaan gedung dan bangunan	695.418.000	637.822.800	91,72
19	Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor	88.600.000	72.858.515	82,23
20	Pemeliharaan kendaraan Roda Empat	242.779.000	241.233.950	99,36
21	Pemeliharaan kendaraan Roda Dua	9.000.000	6.756.320	75,07
22	Perbaikan peralatan fungsional	1.500.000	0	0
23	Langganan daya dan jasa	543.299.000	513.520.416	94,52
24	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	8.000.000	3.810.779	47,63
25	Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja	430.120.000	414.220.000	96,30
26	Honor petugas pramubakti, pengamanan kantor, sopir dan cleaning service	1.221.600.000	1.207.600.000	98,85
27	Sewa gedung/kantor/wilker	41.350.000	37.276.956	90,15
28	Sewa rumah jabatan	30.000.000	30.000.000	100
29	Kalibrasi alat-alat kesehatan	9.000.000	0	0
30	Pas pelabuhan/bandara	33.000.000	30.050.000	91,06
31	Cleaning services	46.200.000	39.829.140	86,21
32	Sewa Mesin Fotocopy	8.400.000	8.400.000	100
33	Pemeriksaan Kesehatan ASN	182.250.000	161.858.500	88,81
34	Langganan Internet Service Provider	308.705.000	281.425.120	91,16
35	Penambah Daya Tahan Tubuh	47.215.000	47.025.000	99,60
36	Inventarisasi BMN	3.000.000	2.000.000	66,67
	Total	5.485.586.000	5.138.651.363	93,68

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 295.612.200,- (85,85 %).

g. Realisasi Anggaran Indikator Ketujuh

Tabel III.33 Realisasi Anggaran Pencapaian Indikator Ketujuh
Perjanjian Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Workshop Pengelolaan Website	17.180.000	16.580.000	96,51
2	Peningkatan Kompetensi (U)	59.740.000	45.576.795	76,29
3	Peningkatan kompetensi petugas teknis sanitasi lingkungan	25.850.000	22.118.700	85,57
4	Peningkatan SDM petugas entomolg kesehatan	33.272.000	19.003.777	57,12
5	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Sanitarian	17.550.000	10.400.000	59,26
6	Mengikuti Diklat / Pelatihan/ Workshop / Simposium dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas	58.376.000	57.675.600	98,80
7	Pelatihan Kedaruratan Kesehatan	6.650.000	6.388.500	96,07
Total		218.618.000	177.743.372	81,30

Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 256.112.570,- (95,37 %).

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja dibuat sebagai bahan evaluasi dan diharapkan terjadi peningkatan dalam pencapaian indikator kinerja tiap tahunnya, karena itu perlu dilakukan pembenahan dalam internal organisasi untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan. Laporan Kinerja KKP Kelas I Makassar tahun 2020 juga merupakan tanggung jawab semua bidang dan bagian dalam mencapai target kinerja berdasarkan indikator yang berhubungan dengan kegiatannya.

Realisasi dari program dan kegiatan pada tahun 2020 sesuai dengan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024. Secara keseluruhan capaian indikator mencapai di atas target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 113,32%.

Keberhasilan pencapaian indikator di tahun 2020 didukung dengan tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, optimalisasi sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sector, juga sebagai acuan untuk peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Untuk tahun-tahun mendatang terhadap indikator yang tercapai tetap menjalankan strategi dan diperlukan pengembangan inovasi sebagai pengungkit capaian kinerja di masa akan datang.

PUSTAKA ACUAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KKP Kelas I Makassar tahun anggaran 2020

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KKP Kelas I Makassar, tahun 2020

Laporan Kinerja KKP Kelas I Makassar, KKP Kelas I Makassar tahun 2019

Laporan Keuangan KKP Kelas I Makassar tahun 2020

Peraturan MENPAN-RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Permenkes RI No. 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Permenkes RI No. 2348/Menkes/PER/XII/2011 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024, KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 Revisi Desember 2020

PENYUSUN

Pengarah	:	dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes
Penanggung Jawab	:	Nirwan SKM, M. Kes
Ketua	:	Yusrianto, SKM
Wakil Ketua	:	Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
Sekretaris	:	Arni Angriany Amir, ST
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH2. Asrun Salam, SKM, M.Kes3. Amran, SKM, M.Kes4. Masnar, AMd.KL, SE5. Markus Minggu, SKM, M.Kes6. Hj. Jumuriah, SKM, M.Kes7. dr. Andi Lukman Hakim Amin8. Hj. Sukarni, SKM, M.Kes9. Kaimuddin, AMd.KL10. Nurhayati HL, SKM11. Nurdiansah Sahrir, SKM12. H. Rajiman, AMd.KL13. Ismainar, AMK14. Fathul Jannah, AMd.Kep15. dr. H. Abbas Zavey Nurdin, Sp.OK, MKK16. Risma Tangnga Guling, AMK17. Andi Ali Resa, SKM, M.Kes18. H.Nur Kamar, SKM, M.Kes19. Hj. Nur Magfirah, SKM20. Hj. Sitti Hamdia, SKM, M.Kes21. Nining Ayu Purnama, S.Kom22. Arfiani, SKM23. Idil Rakhman, SE24. Raisah Naim, S.Si.Apt25. Andi Kudrat, SKM26. Saydaturrizki, AMd.Ak

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Darmawali Handoko, M. Epid
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 31.370.678.000,- berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Anung Sugihantono, M. Kes
NIP 196003201985021002

dr. Darmawali Handoko, M. Epid
NIP 196911252002121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	177.470
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%
2	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	5.894.524.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	25.476.154.000,-
	TOTAL	Rp.	31.370.678.000,-

Jakarta, Desember 2019

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar,



dr. Anung Sugihantono, M. Kes
NIP 196003201985021002



dr. Darmawati Handoko, M. Epid
NIP 196911252002121003

Perjanjian Kinerja Revisi 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. Muh. Haskar Hasan, M.Kes
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 27.997.490.000,- berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

dr. H. Muh. Haskar Hasan, M.Kes
NIP 196610142001121004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan	3722715
		2	Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	85%
		4	Nilai Kinerja Anggaran	80
		5	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan	80%
		6	Kinerja Implementasi WBK Satker	70
		7	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 4.683.036.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 23.314.454.000,-
TOTAL		Rp. 27.997.490.000,-

Jakarta, Desember 2020

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar,

dr. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

dr. H. Muh. Haskar Hasan, M.Kes
NIP 196610142001121004

Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Tahun 2020
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	177,470	195,502	216,290	239,332	264,877	3,834,256,000	4,217,681,600	4,639,449,760	5,103,394,736	5,613,734,210	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
			2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	91%	91%	95%	96%	271,678,000	298,845,800	328,730,380	361,603,418	397,763,760	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
			3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	85%	85%	85%	1,441,496,800	1,585,646,480	1,744,211,128	1,918,632,241	2,110,495,465	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
			4. Nilai kinerja anggaran	80	80	81	82	83	250,260,000	275,286,000	302,814,600	333,096,060	366,405,666	Bagian Tata Usaha
			5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	80%	80%	80%	80%	17,527,846,000	19,280,630,600	21,208,693,660	23,329,563,026	25,662,519,329	Bagian Tata Usaha
			6. Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75	5,430,128,000	5,973,140,800	6,570,454,880	7,227,500,368	7,950,250,405	Bagian Tata Usaha
			7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	45%	45%	45%	45%	453,314,000	498,645,400	548,509,940	603,360,934	663,697,027	Bagian Tata Usaha

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Tahun 2020

**Matriks Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024 Revisi 1 Bulan Desember Tahun 2020
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi (Rp)					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	3,722,715	1,697,238	1,951,824	2,244,597	2,581,287	2,938,296,000	2,952,987,480	3,395,935,602	3,905,325,942	4,491,124,834	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
			2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	95%	95%	96%	153,734,000	154,502,670	177,678,071	204,329,781	234,979,248	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
			3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	90%	90%	90%	1,449,308,000	1,456,554,540	1,675,037,721	1,926,293,379	2,215,237,386	Bidang PKSE, UKLW dan PRL
			4. Nilai kinerja anggaran	80	83	83	83	83	176,192,000	177,072,960	203,633,904	234,178,990	269,305,838	Bagian Tata Usaha
			5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%					17,575,756,000					Bagian Tata Usaha
			5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		93	93	93	93		16,958,428,420	19,502,192,683	22,427,521,585	25,791,649,823	Bagian Tata Usaha
			6. Kinerja implementasi WBK satker	70	72	75	75	75	5,485,586,000	5,513,013,930	6,339,966,020	7,290,960,922	8,384,605,061	Bagian Tata Usaha
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	80%	80%	80%	218,618,000	218,618,000	251,410,700	289,122,305	332,490,651	Bagian Tata Usaha			

Sumber : Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi 1 Bulan Desember Tahun 2020

